



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

TA. 2024

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Renstra BPBD menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja BPBD pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BPBD Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah dan Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana dengan indikator Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana dan 1 (satu) sasaran pendukung yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, maka Core Value ASN berAHKLAK yang merupakan nilai dasar ASN harus diterapkan dan merupakan Nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh ASN. Perilaku berAHKLAK akan memberikan arah bagi ASN dalam berperilaku, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat, bertanggungjawab dan berintegritas.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 10 Oktober 2024



**KEPALA PELAKSANA,**

**APRIL, M. Kes**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 200012 1 002



## RINGKASAN EKSEKUTIF

### VISI

“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

### MISI

MISI Ke- 3 RPJMD

“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”

MISI Ke- 4 RPJMD

“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”

#### NOTIFIKASI

Tercapai ■  
Tidak Tercapai ■

#### SASARAN

##### STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN

#### CAPAIAN KINERJA

I. Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana



1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) = 0,60 (98,36%)

II. Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana



1. Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana = 37,52 %

III. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah



1. NILAI SAKIP Perangkat Daerah = 86,00(A)

a. Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana



1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 67,05 %

b. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana

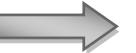


2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 0,08%

c. Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana



3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 27,75%

d. Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai		1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar = 89,34%
1. Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang		1. Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 0%
2. Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak		1. Cakupan warga negara yang meperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 0,08%
3. Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin bencana		1. Cakupan warga negara yang meperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 100%
4. Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai standar		1. Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan = 0%
5. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat		1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu = 100%
6. Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah		1. Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik = 99,37%
7. Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah		1. Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar = 100%
8. Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		1. Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah = 100%
9. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		1. Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah = 96,16%
10. Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah		1. Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi = 33,33%
11. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah = 98,24%
12. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai		1. Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik = 87,66%

## DAFTAR ISI

	<i>hal.</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<i>i</i>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<i>iv</i>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<i>v</i>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<i>vii</i>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<i>viii</i>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas dan Fungsi .....	1
1.2 Struktur Organisasi .....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	4
1.4 Isu Strategis/Permasalahan .....	6
1.5 Sistematika Laporan .....	7
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Target Kinerja tahun 2021-2026 .....	9
1. Visi dan Misi .....	10
2. Indikator Kinerja Sasaran .....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	13
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	16
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	17
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	90

## DAFTAR TABEL

	<i>hal.</i>
Tabel 1	Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026..... 12
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ..... 13
Tabel 3	Program dan Pagu Anggaran Tahun 2024 ..... 14
Tabel 4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja ..... 16
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja S.D Triwulan III Tahun 2024..... 17
Tabel 6	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur s.d Triwulan III Tahun 2024..... 23
Tabel 7	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2024 dengan Triwulan sebelumnya. .... 24
Tabel 8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)..... 25
Tabel 9	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 24 Kab/Kota ..... 26
Tabel 10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2024 ..... 31
Tabel 11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 32
Tabel 12	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III TA. 2024 dengan Tahun Sebelumnya..... 38
Tabel 13	Perbandingan Capaian Kinerja s.d Triwulan III Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026) ..... 39
Tabel 14	Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ..... 40
Tabel 15	Alokasi Anggaran Bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ..... 41
Tabel 16	Kendala Permasalahan dan Solusi SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ..... 42
Tabel 17	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan ..... 56
Tabel 18	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan ..... 56
Tabel 19	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan ..... 57
Tabel 20	Capaian Indikator Kinerja Sasaran ..... 59
Tabel 21	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun sebelumnya ..... 60
Tabel 22	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026) ..... 61
Tabel 23	Pencapaian Kinerja dan Anggaran ..... 63
Tabel 24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 63
Tabel 25	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung..... 65

Tabel 26	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan III Tahun 2024.....	72
Tabel 27	Permasalahan Solusi .....	81

## DAFTAR GRAFIK

	<i>hal.</i>
<b>Grafik 1</b> Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ...	2
<b>Grafik 2</b> Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.....	2
<b>Grafik 3</b> Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1, s.d Triwulan III Tahun 2024.....	18
<b>Grafik 4</b> Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur s.d Triwulan III Tahun 2024 .....	23
<b>Grafik 5</b> Trend Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur 2019 s.d 2023 .....	29
<b>Grafik 6</b> Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2018 s.d 2023 .....	29
<b>Grafik 7</b> Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana Triwulan III TA. 2024. ....	36
<b>Grafik 8</b> Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana s.d Triwulan III Tahun 2024 .....	45
<b>Grafik 9</b> Capaian Kinerja Sasaran 3 s.d Triwulan III Tahun 2024 .....	59
<b>Grafik 10</b> Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2024 .....	72

## BAB 1

## PENDAHULUAN

## 1.1 TUGAS DAN FUNGSI

---

**B**adan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas* : membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah,
- Fungsi* : - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## 1.2 STRUKTUR ORGANISASI

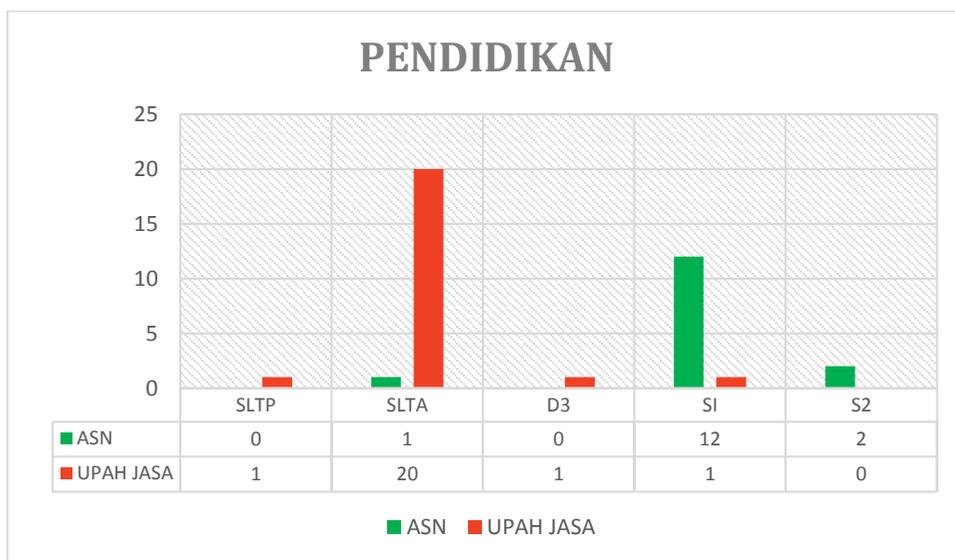
---

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021.

### Sumber Daya Manusia (SDM)

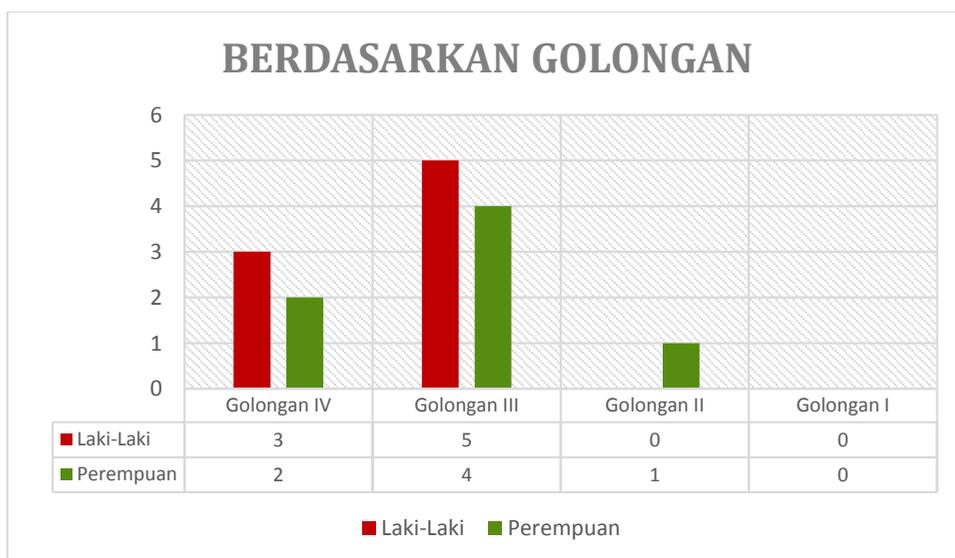
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 38 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 14 orang, PPPK 1 org dan Tenaga Upah Jasa 23 orang (Tenaga Administrasi 1 orang, Cleaning Service 1 orang, Sopir 1 orang dan Tim Reaksi Cepat 21 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :



**Grafik. 1**

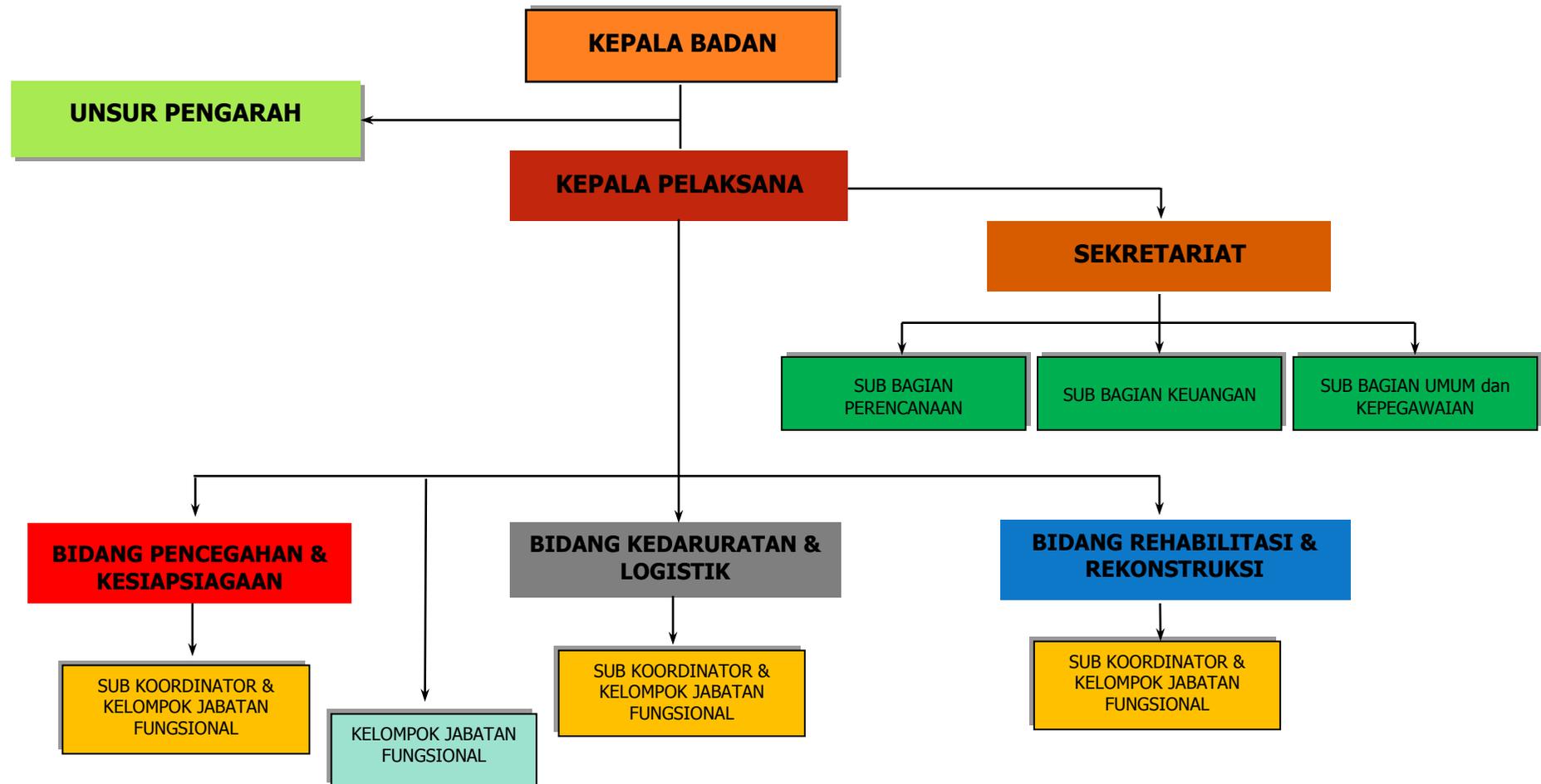
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



**Grafik. 2**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

**Gambar 1**  
 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur  
 Tahun 2024



### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

---

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan **Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana** (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan **Satuan Pelaksana Penanganan Bencana** (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. UU ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang atau Peraturan ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemulihan pasca bencana diatur di dalamnya. BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko serta penanganan korban. Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudah tidak perlu birokrasi administrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana, sampai pasca bencana.

#### 1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

---

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya BPBD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)”**. Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana;
2. Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur
3. Meningkatnya kerusakan lingkungan yang berdampak pada meningkatnya kejadian bencana setiap tahun
4. Belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana
5. Belum optimalnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif
6. Belum memadainya mekanisme pendukung dalam penyelenggaraan pemulihan dampak bencana
7. Keterbatasan sumber daya logistik dan peralatan
8. Belum optimalnya sinergitas dan kordinasi lintas sektor
9. Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana

## 1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

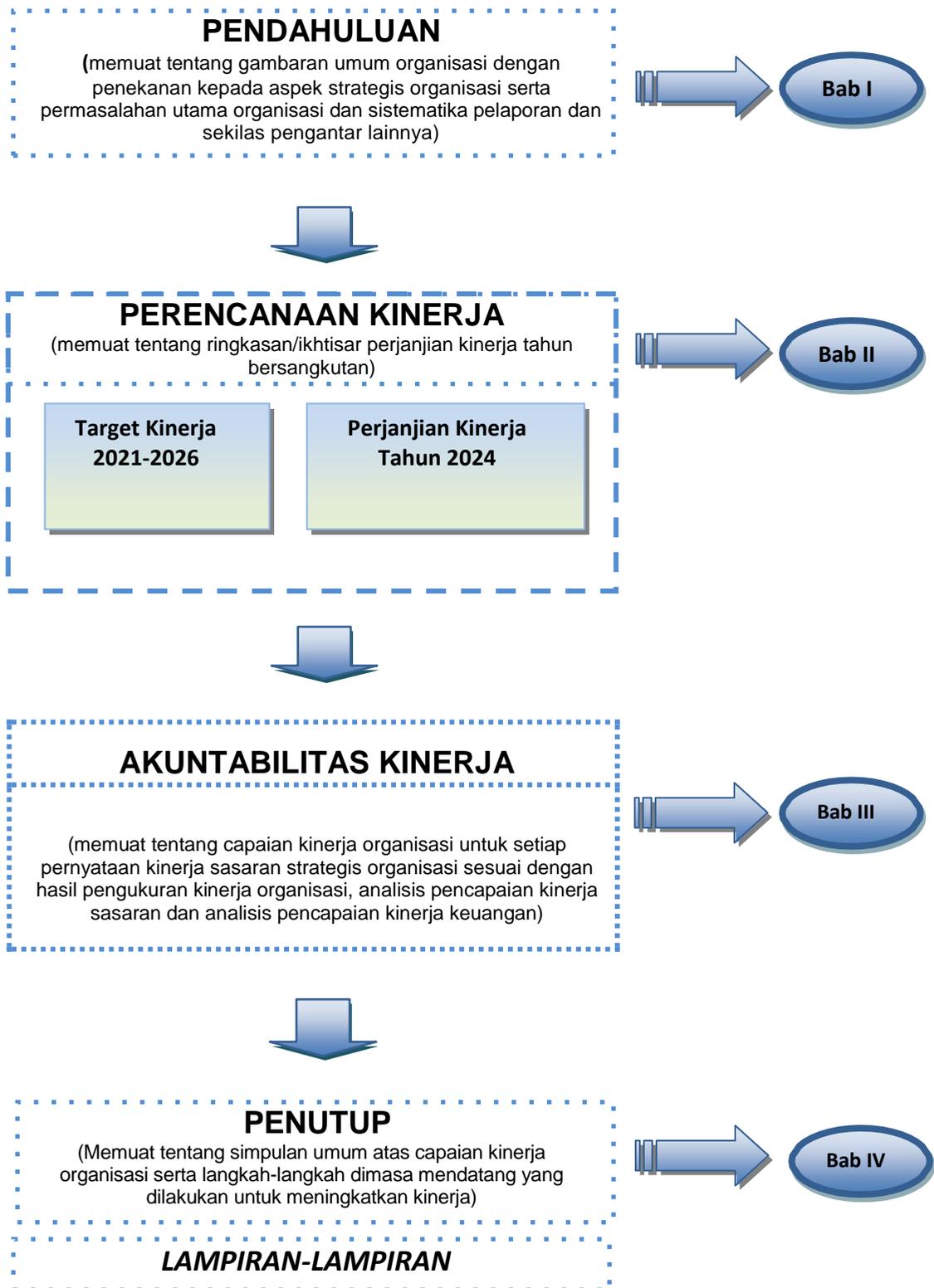
---

Laporan Kinerja Triwulanan ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :

## Referensi Bab



## BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk BPBD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Program pada Renstra BPBD periode 2021-2021 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan Program Nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana dan disesuaikan juga dengan Program Prioritas (KP1) Kepala Daerah. Berdasarkan Renstra BPBD 2021-2026, mencakup 2 (dua) sasaran utama yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dan Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana.

#### A. TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026

---

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya BPBD dalam mewujudkan peran BPBP sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran BPBD dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

## 1. Pernyataan Visi

---

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

**“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju  
Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

## 2. Pernyataan Misi

---

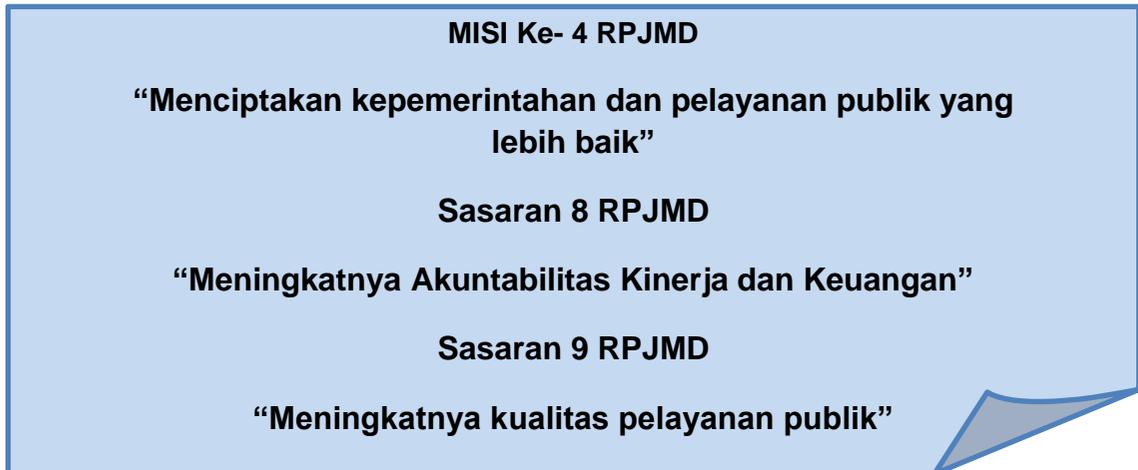
Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur yaitu

**MISI Ke- 3 RPJMD**

**“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”**

**Sasaran 7 RPJMD**

**“Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana”**



### 3. Indikator Kinerja Sasaran

---

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh BPBD Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Menurunkan risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	202	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,50	0,50
2.	Meningkatkan penyelenggaraan SPM sub urusan bencana	Persentase pemenuhan Layanan SPM Sub Urusan Bencana(%)	100	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	-	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	70(BB)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	70	70	75	78	80	80	80	80

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2024 disusun perjanjian kinerja perubahan sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,61 (sedang)
2.	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,06 (A)

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 5.172.606.050,-** (*Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Puluh Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 2.146.665.782,-** belanja barang dan jasa **Rp. 1.820.552.768,-** dan belanja modal **Rp 1.205.387.500,-**.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.**  
**Program dan Pagu Anggaran Tahun 2024**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.539.355.020,-	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	1.633.251.030,-	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>5.172.606.050,-</b>	

## BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang

digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

#### a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

**Tabel. 4**  
**Tingkat Akuntabilitas Kinerja**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

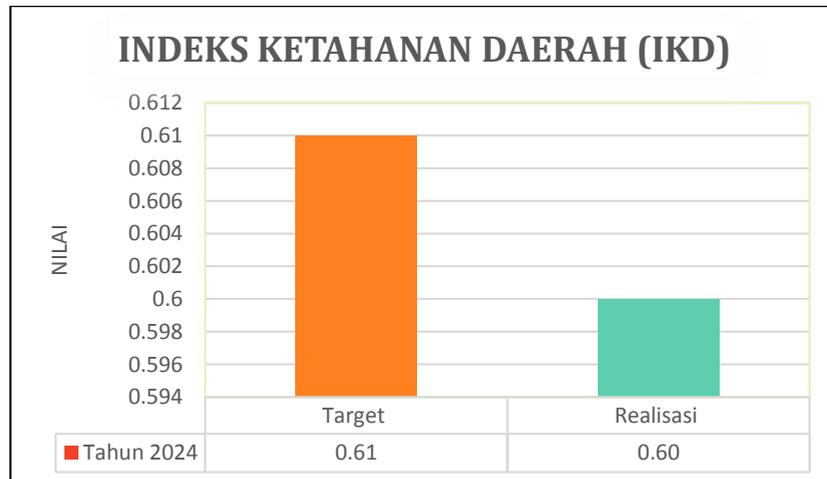
**Tabel. 5**  
**Pengukuran Capaian Kinerja S.D Triwulan III Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III TAHUN 2024	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,61	0,60	98,36	●
2.	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100	85,79	85,79	●
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,06	78,50	94,51	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

**Sasaran Strategis I****Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana****Grafik. 3**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis I, S.D Triwulan III Tahun 2024

### **INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)**

#### **1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2024**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“Nilai Indeks Ketahanan Daerah”**

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2024 adalah 0,61 dan realisasi sebesar 0,60 dengan persentase capaian kinerja 98,36%. Realisasi sampai dengan triwulan III TA. 2024 masih menggunakan baseline tahun 2023 karena untuk penilaian Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024, sesuai timeline penilaian dilaksanakan pada Bulan Nopember 2024 dan dilakukan verifikasi pada Bulan Desember 2024 oleh BNPB.

Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara mandiri yang dilaksanakan pada Bulan Nopember 2023 melalui tahapan Sosialisasi, FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dan Finalisasi yang diikuti oleh OPD terkait. Dalam pelaksanaan FGD didampingi oleh Fasilitator Nasional dan diperoleh hasil 0,60 (sedang). Hasil penilaian tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPBD Provinsi Sulawesi-Selatan, selanjutnya diverifikasi

akhir oleh BNPB pada Bulan Desember 2023. Adapun hasilnya dirilis oleh BNPB melalui BUKU IRBI Tahun 2023 yang diterbitkan pada Awal Tahun 2024.

Capaian target tersebut diperoleh dari penginputan Tools 71 Indikator berdasarkan baseline data 2018-2023 yang dimutakhirkan setiap tahun, dan data tersebut bersumber dari OPD terkait seperti Bapelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, DLH, Satpol PP, Dinas DAMKAR & Penyelamatan, TNI/POLRI dsb.

Penginputan hasil penilaian IKD dilakukan melalui inaRISK yaitu suatu platform yang digunakan untuk menilai kapasitas daerah secara mandiri. Hasil IKD nantinya tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai IKD.

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. **INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)** merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. **IKD** aspek penting: merupakan komponen pada **kajian kapasitas** di dalam KRB **data input** dalam **perhitungan IRBI**. Penilaian IKD dilakukan dengan mekanisme 'pemutakhiran' bukan pengisian dari awal. Hasil penilaian akan diverifikasi oleh Provinsi dan BNPB, sehingga nilai bisa berubah. Nilai IKD yang baik adalah yang selalu meningkat, sehingga baseline yang rendah pun tidak masalah

Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah peningkatan kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan propinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 7 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan, yaitu :
  - Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
  - Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang SOTK BPBD
  - Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Luwu Timur 2011-2031
  - Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
  - Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towuti, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
  - Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
  - Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung
  - Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
  - Perbup BTT Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
  - Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
  - SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 094/Dinkes/115/XI/2022 tentang Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana
  - SK Bupati Luwu Timur Nomor 180/VII/Tahun 2018 tentang SOP Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu :
  - Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
  - Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
  - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, yaitu :
  - PUSDALOPS BPBD
  - Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun
  - Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun
  - Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun

- Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD
  - Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik
  - Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana, yaitu :
- Penataan Ruang berbasis PRB
  - Pembentukan Desa Tangguh Bencana
  - Rumah Sakit terakreditasi (RS. I Lagaligo dan RS. Primaya Hospitasl Inco Soroako)
  - Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas
  - Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Luwu Timur
  - Pembentukan Forum Risiko Bencana Tingkat Kabupaten
  - Forum Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Desa
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, yaitu :
- Rehabilitasi tanggul sungai
  - Normalisasi/Restorasi sungai
  - Pembangunan Bendung Sungai
  - Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta)
  - Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
  - Pembangunan Embung
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yaitu :
- Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
  - Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi
  - Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor TMA Sungai)
  - EWS INA Tews (Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi yang Berpotensi Tsunami)
  - Pelaksanaan Simulasi, Sosialisasi, Pelatihan, Gladi kesiapsiagaan
  - Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Himbauan Peringatan Bencana
  - RTD PT. Vale Indonesia mengenai kegagalan Bendungan
  - Penentuan Status Darurat Bencana
  - Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
  - Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana
  - Pengerahan Tim SAR/BASARNAS

- Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha
  - Penghentian Status Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana, yaitu :
- Perbaiki rumah penduduk (pasca bencana)
  - Bantuan Keuangan untuk korban bencana.

Mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah terkait kebencanaan yaitu Indeks Risiko Bencana, maka BPBD beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk menurunkan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur melalui peningkatan Kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah. Hasil dari penilaian IKD akan berpengaruh terhadap penurunan Nilai IRB IRB Kabupaten Luwu Timur. Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah 152,28 dari target 202, dengan persentase capaian 132,65%.

Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tersebut mengalami penurunan karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. ***“Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun”***. IKD dan IRBI menjadi RAPOR bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana. ***Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berinvestasi dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran IRB dan IKD merupakan ukuran keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota***

**Grafik. 4**

Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur s.d Triwulan III Tahun 2024

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,82	0,60	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,76		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,73		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,60		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,56		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,35		

**Tabel. 6**

Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur s.d Triwulan III Tahun 2024

## 2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan sebelumnya

Tabel. 7  
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana									Target Tahun 2024
	Triwulan I Tahun 2024			Triwulan II Tahun 2024			Triwulan III Tahun 2024			
Indikator Kinerja Sasaran	Targ et	Realis asi	Capaian	Targ et	Realis asi	Capaian	Targ et	Reali sasi	Capaian	
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,61	0,60	98,36 %	0,61	0,60	98,36 %	0,61	0,60	98,36 %	0,61 (sedang)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja Triwulan III dengan Tahun 2024 dengan Triwulan sebelumnya, nilainya masih sama. Hal ini karena Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 belum dilaksanakan, sehingga data tersebut diatas masih berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2023 (Baseline Tahun 2023). Pelaksanaan FGD untuk Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 direncanakan pada Triwulan IV TA. 2024 sesuai dengan Timeline Penilaian IKD.

Penetapan target yang meningkat setiap tahunnya disesuaikan dengan target yang tertuang dalam Renstra BPBD 2021-2026.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, telah melampaui target yang direncanakan. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai IKD melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah setiap tahunnya, agar 7 prioritas dengan 71 indikator dan 284 Pertanyaan dapat dipenuhi secara bertahap, yang pada akhirnya dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada Triwulan III Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

**Tabel. 8**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah**  
**(2021 – 2026)**

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
	Realisasi			
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan III Tahun 2024	Realisasi sampai dengan Tahun 2024		
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,60	0,60	0,50 (sedang)	120%

#### 4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tidak ditetapkan Standar Nasional tetapi hanya score penilaian yaitu 0,01 s.d 0,39 kategori **Rendah**, 0,40 s.d 0,79 kategori **Sedang** dan 0,8 s.d 1 kategori **Tinggi**. Dan sampai dengan Triwulan II TA. 2024, Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur masih menggunakan baseline tahun 2023 yaitu 0,60 dengan predikat sedang.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mempunyai Timeline penilaian setiap tahunnya yaitu proses pengumpulan data dan penilaian IKD sampai dengan bulan September, selanjutnya pengumpulan dan Verifikasi IKD bulan Oktober s.d Nopember oleh BPBD Provinsi dan pada bulan Desember dilakukan verifikasi, perhitungan dan publikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur s.d Triwulan III TA. 2024 masih menggunakan Baseline Tahun 2023 yaitu 0,60 dengan predikat sedang dari target yang direncanakan sebesar 0,45 dengan persentase capaian kinerja 133,33%. Nilai yang diperoleh Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,42 (sedang) yang merupakan hasil rata-rata nilai IKD dari 24 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi-Selatan. Dan bila dibandingkan dengan 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat I. Hal ini bisa tercapai karena Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini BPBD Kab. Luwu Timur telah menetapkan IKD sebagai Indikator Kinerja Utama. Didukung dengan penganggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi dan FGD Penilaian Indeks

Ketahanan Daerah yang didampingi oleh Fasilitator Nasional dan Daerah. Pada pelaksanaan FGD tersebut menghadirkan OPD terkait sehingga diperoleh data dan informasi pendukung yang lebih akurat dan lengkap. Adapun perbandingan Nilai IKD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.9**  
Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 24 Kab/Kota

KABUPATEN/KOTA	NILAI IKD TAHUN 2023
Kepulauan Selayar	0,41
Bulukumba	0,37
Bantaeng	Tidak menilai
Jeneponto	Tidak menilai
Takalar	Tidak menilai
Gowa	Tidak menilai
Sinjai	Tidak menilai
Maros	Tidak menilai
Pangkajene & Kepulauan	0,34
Barru	0,54
Bone	0,43
Soppeng	0,31
Wajo	0,55
Sidenreng Rappang	0,28
Pinrang	Tidak menilai
Enrekang	0,45
Luwu	0,35
Tana Toraja	Tidak menilai
Luwu Utara	0,59
<b>LUWU TIMUR</b>	<b>0,60</b>
Toraja Utara	0,27
Kota Makassar	Tidak menilai
Kota Pare-Pare	0,41
Kota Palopo	0,56

## 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :
  - Ditetapkannya Mitigasi Bencana sebagai Program Prioritas Kepala Daerah sehingga Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah menjadi lebih focus dalam pencapaiannya.

- Tersedianya Data Base (Baseline 2018-2023) berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Telah dilakukan pemutakhiran data IKD setiap tahun oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan melibatkan OPD terkait, Instansi Vertikal dan Dunia Usaha.
- Terdapat beberapa rekomendasi pada penilaian IKD tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi, PUSDALOPS BPBD, Sistem Peringatan Dini Banjir (EWS), RDTR yang telah berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan beberapa rencana penyusunan dokumen kebencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra BPBD 2021-2026, Penyusunan Dokumen KRB, Dokumen RPB dsb.
- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah karena telah menetapkan Mitigasi Bencana sebagai program prioritas kepala daerah dan dukungan penganggaran untuk kegiatan Mitigasi Bencana di seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK).

#### ❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Timeline Penilaian IKD sudah ditetapkan setiap tahunnya oleh BNPB, dengan waktu verifikasi dan rilis nilai IKD ditetapkan diakhir tahun.
- Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di BPBD
- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Belum meratanya pemahaman terkait IRB dan IKD di beberapa stakeholder
- Telah banyak upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan namun belum terpetakan dengan baik
- Belum maksimalnya partisipasi OPD terkait pada pelaksanaan FGD Penilaian IKD.

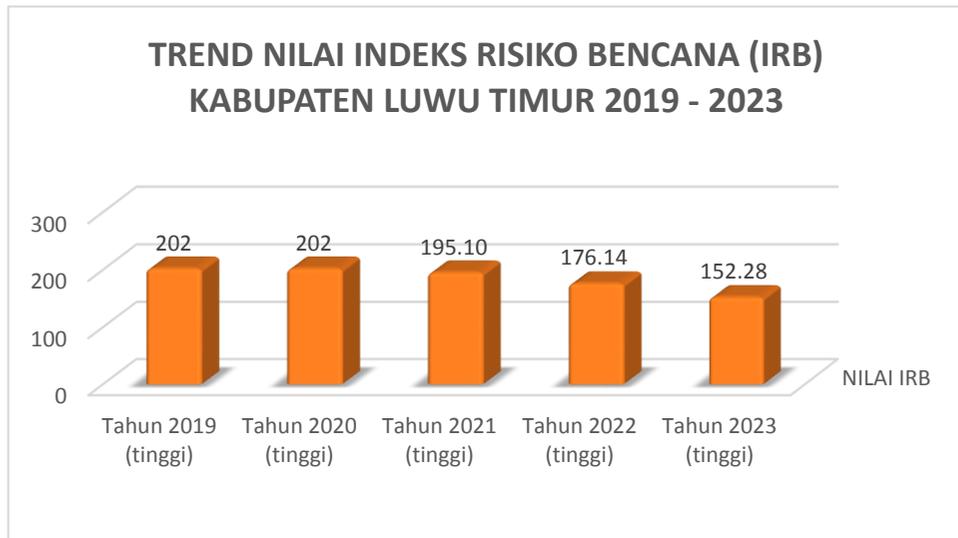
### ❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

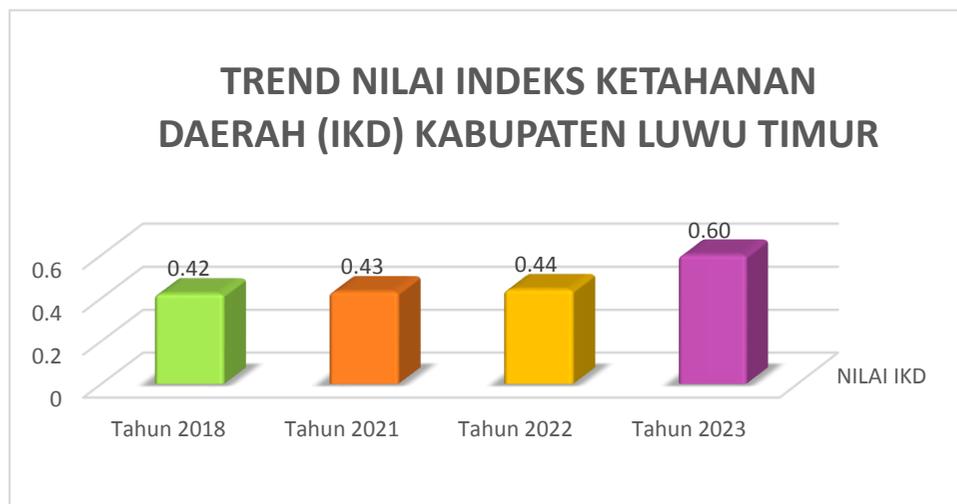
- Nilai IKD setiap triwulannya tetap menggunakan baseline tahun sebelumnya
- Mengusulkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait
- Melakukan sosialisasi/lokakarya terkait IRB dan IKD
- Melakukan pemetaan terkait upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Luwu Timur
- Pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD sesuai timeline.

### ❖ **Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dalam menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD**

Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana sudah dikatakan efektif atau berhasil, dengan melihat Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya yang dicapai melalui Peningkatan Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Keberhasilan tersebut dicapai melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas OPD. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya bertumpuh pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja tetapi didukung oleh OPD teknis terkait, Akademisi, Dunia Usaha, media dan Masyarakat atau (Pentahelix Kebencanaan).



Grafik 5  
Trend Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur 2019 s.d 2023



Grafik 6  
Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2018 s.d 2023

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

### ❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, terdapat beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Terkait kebutuhan logistik penanggulangan bencana, pada tahun 2024, BNPB dan BPBD Provinsi Sul-Sel memfasilitasi logistik korban bencana untuk BPBD Kab. Luwu Timur, daftar bantuan logistik Tahap I yaitu :

Makanan Siap Saji 6 paket, Matras 5 lbr, Sabun Mandi 144 Pcs, Jerigen Lipat 30 Pcs, Perlengkapan sekolah 7 Pcs, Logistik Pangan 15 Paket (Gula pasir, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Beras, Air Mineral), Logistik Perlengkapan Keluarga 5 Paket (Sabun Mandi, Sikat Gigi, Pasta Gisi, Shampo, Handuk Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut, Sarung, Minyak kayu Putih), Logistik Shelter Kit (Tenda Terpal Plastik 3 buah dan selimut 20 buah). Dan bantuan logistic Tahap II, terdiri dari : Makanan Siap Saji 6 Paket, Matras 5 Lbr, Sabun Mandi 72 Pcs, Jerigen Lipat 30 Pcs, Ember 10 Pcs, Masker 2000 Pcs, Logistik Pangan 20 Paket (Gula Pasir, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Air Mineral), Logistik Shelter Kit (selimut 20 buah).

- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD, juga disediakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dalam pencapaian target program prioritas (KP 1) Pemerintah Daerah yaitu MITIGASI BENCANA, terdapat pelaksanaan program/kegiatan di Desa melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2024 ataupun menggunakan Dana Desa yang dilaksanakan oleh beberapa desa di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengadaan APAR.

#### ❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat melihat langsung informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbauan peringatan dini tersebut. Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan melalui Media Sosial yaitu FB, IG & Twitter yaitu [Pusdalops Bpbd Lutim](#).
- Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 38 orang yang terdiri dari

14 orang PNS, PPPK 1 org, 2 orang Upah Jasa, dan 21 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinas Perikanan, Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.

- Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada. Terkait Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana, telah diajukan Proposal ke BNPB dan telah di Verifikasi Oleh BNPB dengan Besaran Anggaran Rp 8.587.571.000,-.

#### ❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

**Tabel. 10**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Triwulan III Tahun 2024	Realisasi s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,61	0,60	98,36%	1.446.526.960,-	498.243.117,-	34,44%
Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%	85,79	85,79			

Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	96,99	96,99	116.395.070,-	24.924.860,-	21,41%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	93,06%	93,06%	257.723.360,-	66.331.780,-	25,74%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	67,32	67,32	583.623.070,-	379.318.250,-	64,99%
	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	100%	0%	0%	488.785.460,-	26.669.227,-	5,66%

**Tabel. 11**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	98,36%	34,44%	65,56%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana sebesar 98,36% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 34,44%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 65,56%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

## 7. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran

### ❖ Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Tujuan program penanggulangan bencana** yaitu : memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bukan hanya melekat pada BPBD saja tetapi didukung oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinsos P3A, Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, BKAD, Bapelitbangda, BKPSDM, Dinas PMD, DPRD, TNI/POLRI, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, Media dan Masyarakat. Dan dalam Upaya pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana, sangat dibutuhkan kolaborasi Pentahelik kebencanaan. Dan sebagai OPD pengampuh untuk pencapaian Indikator Kepala Daerah yaitu Penurunan Indeks Risiko Bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), maka BPBD sebagai leading sektor yang bertugas untuk melaksanakan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan melibatkan seluruh OPD terkait dalam Forum Group Discussion (FGD) untuk mengetahui seberapa besar kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Sehingga nantinya akan diperoleh data dan informasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh. Dan salah satu program yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Luwu Timur dalam pencapaian sasaran yaitu Program Penanggulangan Bencana, dan melalui program tersebut, beberapa indikator dalam penilaian Ketangguhan daerah dapat dipenuhi. Seperti Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Kontingenji, Pengintegrasian dokumen KRB kedalam RTRW, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten,

penyediaan logistik korban bencana, penanganan darurat bencana, pemulihan pasca bencana, diklat kebencanaan, pembentukan Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman Bencana, Sosialisasi Rawan Bencana, Penyusunan Regulasi kebencanaan dsb.

Pada tahun 2024, Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
  - Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
  - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
  - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
  - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana Kontijensi
  - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
  - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
  - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :
  - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.

## 8. KESIMPULAN

---

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana” dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu 98,36% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Realisasi IKD}}{\text{Target IKD}} \times 100$$

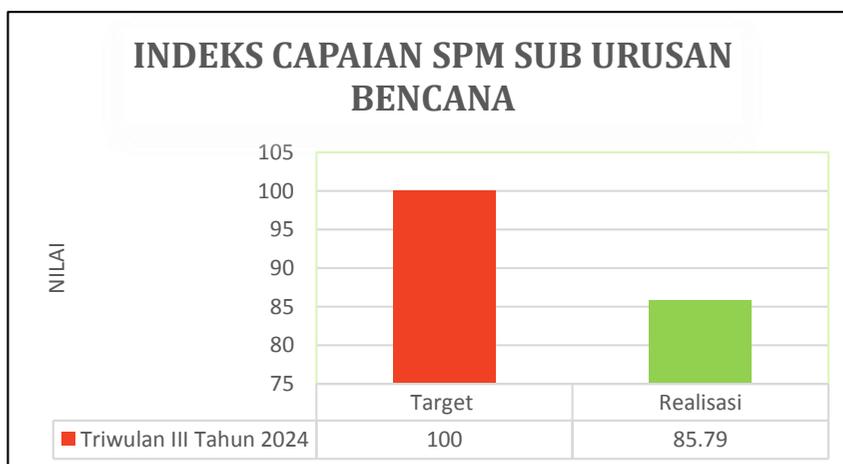
$$= \frac{0,60}{0,61} \times 100$$

$$= 98,36\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 1.446.526.960,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 498.243.117,-** atau **34,44%**.

## Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana



Grafik. 7

Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana Triwulan III TA. 2024

#### Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana

##### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“Pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)”**

Indeks .Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Perhitungan indeks capaian SPM dilakukan melalui penginputan pada aplikasi SPM dengan **link <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>**.

Target Indikator sasaran 2 Triwulan III Tahun 2024 adalah 100% dan realisasi S.D Triwulan III Tahun 2024 adalah 85,79% dengan persentase capaian kinerja 85,79%. Terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yaitu 51,59%. Hal ini karena adanya perbaikan target tahunan yang disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan hasil konsultasi dengan Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan serta Zoom Meeting tentang Tata cara penginputan SPM Triwulan II Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kemendagri.

Realisasi yang tidak mencapai target disebabkan karena dua layanan SPM realisasinya tidak maksimal yaitu Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 93,06% dan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana terealisasinya 67,32%, sedangkan Layanan Informasi Rawan Bencana yang realisasinya 96,99%. Hal ini karena terdapat beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai anggaran kas dan rencana aksi.

Layanan informasi rawan bencana dapat diberikan kepada Masyarakat melalui 3 metode yaitu sosialisasi melalui tatap muka dengan masyarakat di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia serta sosialisasi melalui papan informasi publik. Dari ketiga hal tersebut, salah satu metode penyebaran informasi melalui papan informasi publik yang ditempatkan di 3 kecamatan mengalami kerusakan (rusak berat) yang berada di Kecamatan Wotu, Nuha dan Towuti. Dan sesuai dengan rencana aksi, Pembangunan papan informasi publi tersebut direncanakana pada triwulan II TA. 2024, namun belum selesai dan saat ini masih dalam proses pelaksanaan persiapan untuk pemasangan dilokasi yang telah ditentukan. Hal inilah yang menyebabkan sehingga capaian penyebaran informasi menjadi tidak maksimal atau tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan Sosialisasi KIE Rawan Bencana telah dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2024, dengan sasaran sosialisasi adalah Pelajar Tingkat SMP/SMA. Demikian halnya dengan Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, masih terdapat sub kegiatan yang direncanakana pada triwulan II TA. 2024 namun belum dilaksanakan yaitu Pelatihan Pencegahan & Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota. Terdapat kendala dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yaitu adanya perbaikan rekening belanja sehingga pelaksanaannya menunggu perubahan anggaran. Sedangkan untuk Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, realisasinya disesuaikan dengan jumlah korban bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Dan kita ketahui bahwa kejadian bencana tidak dapat diprediksi kapan, Dimana dan berapa banyak jumlah korban dan kerugian yang terdampak.

## 2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan III TA. 2024 dengan tahun Triwulan Sebelumnya

Tabel. 12  
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran II :	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana									Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan I Tahun 2024			Triwulan II Tahun 2024			Triwulan III Tahun 2024			
	Targ et	Realis asi	Capai an	Targ et	Realis asi	Capaia n	Targ et	Realis asi	Capaia n	
Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100 %	51,59 %	51,59 %	100 %	37,52 %	37,52 %	100 %	85,79 %	85,79 %	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi s.d Triwulan III Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan dalam hal penetapan target tahunan yang disesuaikan dengan hasil Zoom Meeting tentang Tata Cara Penginputan SPM Triwulan II Tahun 2024 oleh Kemendagri dan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian ke-3 jenis layanan tersebut belum maksimal karena beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi/anggaran kas. Capaian Layanan Informasi Rawan Bencana belum maksimal karena terdapat papan informasi publik yang berisi tentang informasi kebencanaan yang ditempatkan di beberapa kecamatan mengalami kerusakan dan saat ini pembuatan papan himbuan peringatan dini masih dalam proses pelaksanaan. Namun demikian untuk penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial (FB, Instagram, Website) tetap dilakukan guna memaksimalkan penyebaran informasi tentang kepada Masyarakat. Demikian halnya dengan Layanan Pencegahan & Kesiapsiagaan terhadap Bencana, masih terdapat sub kegiatan yang direncanakan pada triwulan III TA. 2024, Namun belum terlaksana dan masih dalam proses yaitu Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana, masih menunggu perubahan anggaran karena adanya perbaikan rekening belanja. Sedangkan untuk Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana realisasinya disesuaikan dengan kejadian bencana yang terjadi.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 13  
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Triwulan III Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)

Sasaran 2 :	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Triwulan III Tahun 2024	realisasi rata-rata sampai dengan Triwulan III tahun 2024		
Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	85,79	85,79	100	93,78%

Berdasarkan realisasi rata-rata tahun 2022 s.d triwulan III Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan untuk dapat dicapai. Dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target 3 layanan dasar sub urusan bencana yaitu untuk layanan informasi rawan bencana dengan cara memaksimalkan penyebaran informasi melalui media sosial dan papan himbuan peringatan dini bencana di setiap kecamatan serta sosialisasi secara tatap muka langsung melalui pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana di 11 kecamatan. Sedangkan untuk layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan cara memaksimalkan pelaksanaan kegiatan serta anggaran yang terdapat pada beberapa OPD terkait misalnya Pelaksanaan kegiatan kebencanaan melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan untuk Mitigasi Bencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dunia usaha dan Masyarakat. Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana BMKG untuk deteksi Gempa Bumi Lokal dan yang bersumber dari luar wilayah Luwu Timur. Begitu juga untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dengan memaksimalkan koordinasi dengan BASARNAS, pengerahan Tim Relawan, dunia usaha dan masyarakat dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

#### 4. Perbandingan dengan Target Nasional (SPM Penanggulangan Bencana)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun **Target nasional** dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah **100% setiap tahun**. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 14

Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja			Anggaran		Realisasi (%)
		Indikator Capaian	Target Nasional (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2024 (%)	Anggaran Triwulan III Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan III Tahun 2024 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	96,99%	116.395.070,-	24.924.860,-	21,41%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	93,06%	257.723.360,-	66.331.780,-	25,74%

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	67,32%	583.623.070,-	379.318.250,-	64,99%
---	--	--	------	--------	---------------	---------------	--------

**Tabel. 15**  
**Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Alokasi Biaya		
			Anggaran		
			APBN	APBD	Sumber dana lain yang sah
1	2	3	4	5	6
		<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	-	<b>1.126.855.570,-</b>	-
1	<b>Pelayanan Informasi Rawan bencana</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	-	<b>116.395.070,-</b>	-
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	116.395.070,-	-
2	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	-	<b>257.723.360,-</b>	-
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	61.020.750,-	-
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	65.750.000,-	-
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	57.937.800,-	-
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	35.877.450,-	-
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	37.138.100,-	-
3	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	-	<b>752.737.140,-</b>	-
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	625.230.900,-	-

		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	39.175.000,-	-
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	39.073.600,-	-
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/ Wabah Penyakit	-	28,797,040,-	-
		Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	-	20.460.600,-	-

**Tabel. 16**  
**Kendala, Permasalahan dan Solusi**  
**SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana, (2). Terdapat Papan Hibauan Informasi Bencana di 3 Kecamatan dalam kondisi rusak berat.	(1).Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Hibauan Peringatan Dini dan Media Sosial, (2).Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebarluasan informasi rawan bencana, (3).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana (2). Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai rencana aksi	(1).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan, (2).Memaksimalkan program dan kegiatan pada OPD terkait yang menyediakan anggaran untuk Mitigasi Bencana struktural dan Non Struktural
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(1).Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (2).Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, (3).Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis	(1).Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG, (2).Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan, (3).Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, (4). Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur

## 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

---

- ❖ Analisis Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu <100% yaitu :
  - Pemahaman terkait pentingnya informasi kebencanaan belum merata di masyarakat
  - Terbatasnya sarana dan prasarana penyebarluasan informasi kebencanaan
  - Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan kebencanaan
  - Belum maksimalnya pemahaman terkait konsep pelayanan dasar
  
- ❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

  - Adanya perbedaan persepsi terkait penetapan target triwulan & tahunan
  - Kurangnya sosialisasi
  - Minimnya kualitas SDM penanggulangan bencana
  - Keterbatasan anggaran
  - Terdapat beberapa media penyampaian informasi peringatan dini bencana yang mengalami kerusakan
  - Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai rencana aksi
  
- ❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

  - Penentuan target tahunan harus sesuai dengan capaian tahun sebelumnya
  - Memaksimalkan sosialisasi KIE rawan bencana melalui media sosial (FB, IG, WA) dan melalui papan informasi publik
  - Memaksimalkan koordinasi lintas OPD terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian SPM di kabupaten misalnya dengan Dinas PMD terkait penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) untuk Mitigasi Bencana di desa, Dinas Sosial &P3A terkait penyediaan logistik untuk korban bencana, Dinas PUPR terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Mitigasi Bencana Struktural, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan terkait Cadangan pangan dsb.

- Pencapaian target semaksimal mungkin dengan mencermati capaian program/kegiatan lintas OPD yang berkontribusi dalam pencapaian SPM urusan bencana.
- Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui diklat/pelatihan dan simulasi
- Percepatan pelaksanaan kegiatan

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

---

### ❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Adanya penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan Mitigasi Bencana di desa.
- Efisiensi anggaran logistik untuk korban bencana karena adanya supporting logistik dari BNPB dan BPBD Provinsi Sul-Sel dan OPD terkait seperti bantuan logistik dari Dinas Sosial & P3A, Cadangan Pangan dari Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan serta bantuan logistik dari dunia usaha dan Masyarakat.
- Pelaksanaan Kegiatan Kebencanaan oleh Dunia Usaha, Masyarakat dan Lembaga lainnya misalnya BAZNAS Tanggap Bencana, Kegiatan Pelatihan Mitigasi Bencana oleh Karang Taruna Luwu Timur, Pelaksanaan Sosialisasi, Edukasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana di sekolah-sekolah dan Damkar Masuk Sekolah.

### ❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

- Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi kebencanaan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana BMKG dalam penyebarluasan informasi kebencanaan seperti alat deteksi gempa bumi lokal yang berada di 3 titik yaitu di Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Ussu Kec. Malili, Desa Kalpataru Kec. Tomoni dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa yang berasal dari luar Kabupaten Luwu Timur yang ditempatkan di Kantor BPBD.

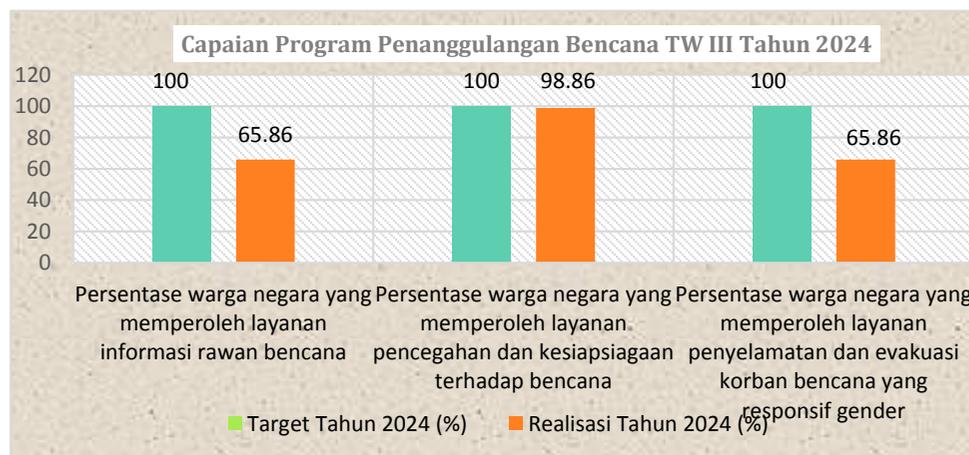
## 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

### ❖ Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi

**Sasaran program adalah :** (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, (2) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana, (3) Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

#### Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana (outcome)



**Grafik. 8**

Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana s.d Triwulan III Tahun 2024

### ❖ Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2024 adalah :

- a. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

**Formulasi :** "Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus".

$$= \frac{207.184}{308.530} \times 100$$

$$= 67,15\%$$

Target Triwulan III Tahun 2024 adalah 100% dan realisasi 67,15% dengan persentase capaian kinerja 67,15%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS BPBD, Penyampaian informasi kebencanaan melalui Papan himbauan informasi bencana dan rambu-rambu peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana yang ditempatkan di 8 kecamatan, dengan akumulasi jumlah masyarakat yang menerima layanan informasi sebesar 207.184 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 308.530 jiwa. Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 3 kecamatan yang belum tersedia papan himbauan informasi bencana karena kondisinya rusak berat, dan telah dianggarkan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan saat ini dalam proses pelaksanaan untuk pemasangan dilokasi.

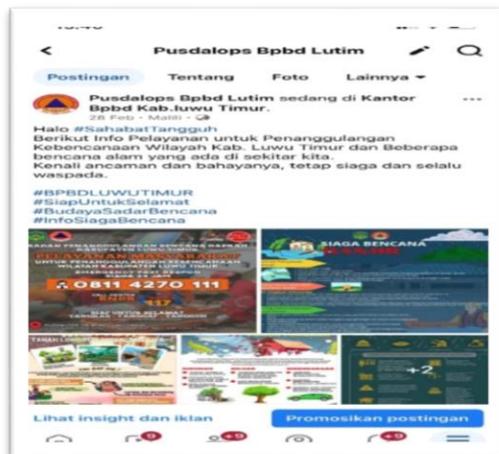
**Dokumentasi Layanan Informasi Rawan Bencana**



Papan Himbauan Peringatan Dini Bencana



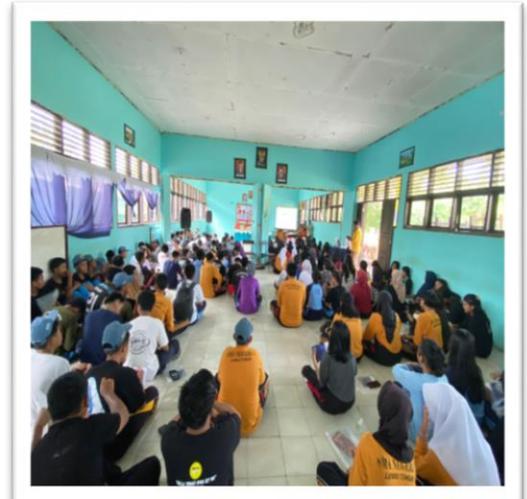
Papan Himbauan Peringatan Dini Bencana



Media Sosial BPBD



Rambu-Rambu Peringatan Daerah Rawan



Sosialisasi KIE Rawan Bencana di Sekolah

- b. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)  
**Formulasi** : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.

$$= \frac{13.017}{13.167} \times 100$$

$$= 98,86\%$$

Target Triwulan III Tahun 2024 adalah 100% dan realisasi 98,86% dengan persentase capaian kinerja 98,86%. Target yang ditetapkan untuk layanan ini adalah 13.167 org yang berada di daerah rawan bencana. Komponen penyusun dalam indikator ini berasal dari sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan



Alat Pemantau Gempa Bumi Lokal



Sistem Peringatan Dini Banjir Sungai Malili

Alat Deteksi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami (INA Tews)



Sistem Peringatan Dini Banjir Sungai Kalaena



Pembukaan Simulasi PB oleh SEKDA Kab. Lutim



Pelaksanaan Simulasi oleh Tim Penggerak PKK



Pertolongan Darurat oleh TRC-BPBD



Pembentukan POSKO Tanggap Darurat Bencana

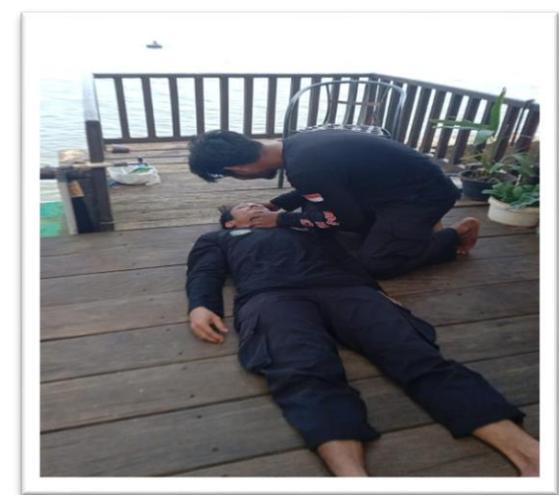
Pendirian Pos Kesehatan



Pendirian Tenda Pengungsi



Pemberian Materi Pelatihan TRC



## Praktek Pelatihan TRC



Pembentukan Destana Desa Argomulyo



Pembentukan Destana Desa Balambano



Pembentukan Destana Desa Laskap



Pembentukan Destana Desa Puncak Indah

- d. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)**

**Formulasi** : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana dibagi jumlah seluruh keseluruhan korban bencana dikali seratus”.

$$= \frac{845 \text{ jiwa}}{1.283 \text{ jiwa}} \times 100$$

$$= 65,86\%$$

Target Triwulan III tahun 2024 adalah 100% dan realisasi 65,86% dengan persentase capaian kinerja 65,86%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d September 2024 sebanyak 845 jiwa (452 Laki-laki dan 393 Perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi total korban bencana dari 235 kejadian bencana yang terjadi di Kab. Luwu Timur.

### Dokumentasi Layanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Bencana



Kunjungan Bupati ke lokasi pencarian orang tenggelam



Pencarian orang tenggelam di Sungai Kalaena



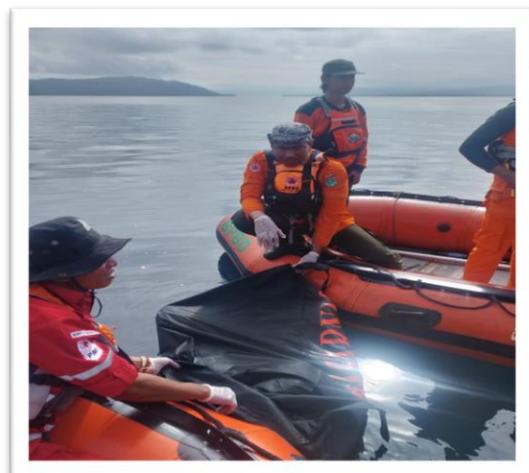
Respon Cepat Pembersihan Sungai Akibat Banjir oleh TRC, DAMKAR & BASARNAS





**Penyelamatan & Evakuasi Korban Banjir Desa Pongkeru Kec. Malili**

**Briefing Penyelamatan & Evakuasi Korban Orang Tenggelam di Danau Desa Bantilang Kec. Towuti**



**Evakuasi Korban Tenggelam**



Penyaluran Bantuan Logistik Banjir Bandang di Kab. Luwu Oleh Wakil Bupati Luwu Timur



Penyaluran Bantuan Logistik oleh Kepala BPBD



Respon Cepat Pohon Tumbang oleh TRC



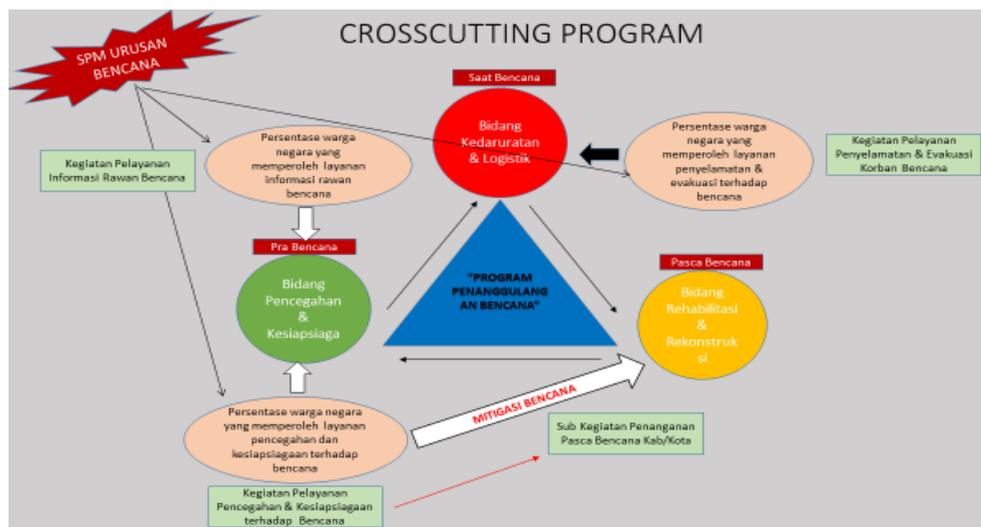
Penyaluran Bantuan Logistik Korban Kebakaran Rumah di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana





Penyaluran Bantuan Logistik Korban Banjir Desa Burau Pantai Kec. Burau

### Crosscutting Program Penanggulangan Bencana dalam Pencapaian SPM Sub Urusan bencana :



Pada tahun 2024, pencapaian SPM Sub Urusan Bencana pada Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
  - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap Korban bencana
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
  - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit

Adapun capaian kinerja Kegiatan/Sub kegiatan s.d Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

#### 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Target s.d TW III TA. 2024	Realisasi s.d TW III TA. 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,08%	0,08%	0,08%	100%
b.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	250 org	250 org	250 org	100%

**Tabel. 17**  
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

## 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

**Tabel. 18**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Target s.d TW III TA. 2024	Realisasi s.d TW III TA. 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	6	7
1.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4,36%	4,36%	4,23%	97,02%
a.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparaturnya dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	100 org	100 org	0 org	0%
b.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	77 unit	77 unit	0 unit	0%
c.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	4 Desa	4 Desa	4 Desa	100%
d.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	50 org	50 org	37 org	74%
e.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	250 org	250 org	250 org	100%

## 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

**Tabel. 19**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Target s.d TW III TA. 2024	Realisasi s.d TW III TA.2024	Capaian (%)
1.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%	100%
a.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	100%
b.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%
c.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100%	100%	100%	100%
d.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah Penyakit	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100%	100%	100%	100%
e.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%

## 8. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana yaitu 85,79% diperoleh dari rumus perhitungan :

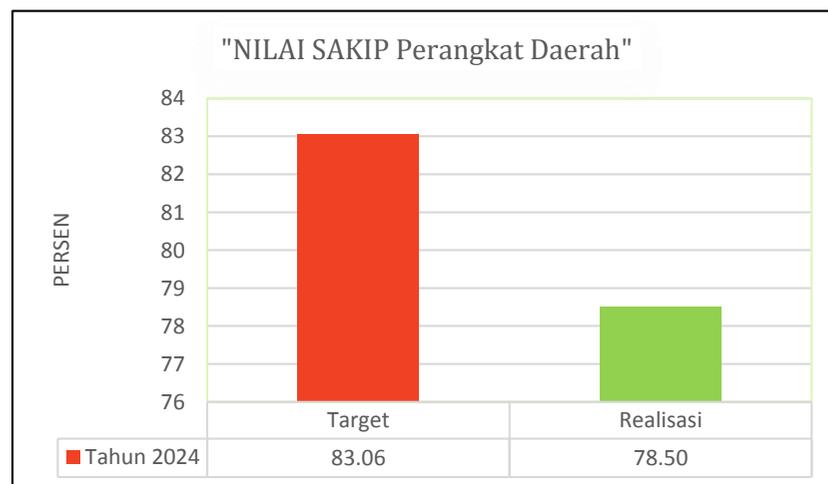
$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$= \frac{85,79}{100} \times 100$$

$$= 85,79\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 957.741.500,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 470.574.890,-** atau **49,13%**.

### Sasaran 3 (Sasaran Pendukung) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Grafik. 9  
Capaian Kinerja Sasaran 3 s.d Triwulan III Tahun 2024

#### ✚ NILAI SAKIP Perangkat Daerah

##### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2024

Tabel. 20  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Notifikasi
---------------	---	------------

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024			
	Target	Realisasi	Capaian	
NILAI SAKIP Perangkat Daerah	83,06	78,50	94,50	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

**Formulasi Indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah **“NILAI SAKIP Hasil LHE Inspektorat”**.

Target Indikator sasaran Tahun 2024 adalah Nilai SAKIP 83,06(A), namun realisasinya belum dapat dirilis karena belum dilakukan evaluasi sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi Nilai SAKIP s.d Triwulan II Tahun 2024. Nilai SAKIP Triwulan II TA. 2024 berdasarkan LHE Inspektorat Tahun 2024 yaitu 78,50 (BB), sedangkan untuk Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan karena belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten. Jika melihat Nilai SAKIP s.d Triwulan II Tahun 2024 dibandingkan dengan Target yang ditetapkan untuk Tahun 2024, masih belum mencapai target yang direncanakan. Hal ini karena evaluasi kinerja yang dilaksanakan masih sampai dengan Triwulan II TA. 2024. Dan beberapa sub kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan sehingga mempengaruhi realisasi kinerja. Disamping itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja yaitu :

- Belum adanya penerapan Punishment and Reward
- Masih terdapat ASN yang belum melakukan penginputan SKP
- Belum adanya penggunaan Aplikasi pada evaluasi kinerja

## 2. Perbandingan antara target dan realisasi s.d Triwulan III Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

**Tabel. 21**

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah									Target Tahun 2026
	Tahun 2022			Tahun 2023			s.d Triwulan II Tahun 2024			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
NILAI SAKIP Perangkat Daerah	75	83,05	110,73 %	83,05	86,00	103,55 %	83,06	78,50	94,51%	80

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Nilai SAKIP s.d Triwulan II Tahun 2024 adalah 78,50 dengan predikat BB, sedangkan untuk Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dirilis karena belum dilakukan penilaian atau evaluasi. Namun telah dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, Dimana target setiap tahunnya dapat tercapai dengan nilai yang meningkat dan melebihi dari target yang direncanakan. Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai SAKIP yang diperoleh, beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Melakukan Reviu kembali Dokumen Perencanaan (Renstra)
- b. Penetapan target kinerja mengacu kepada capaian dan realisasi tahun sebelumnya
- c. Melengkapi IKU dengan defenisi operasional
- d. Meningkatkan kualitas LKJ dengan memperdalam analisis capaian dan disertai data dan bukti dukung yang relevan
- e. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja
- f. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
- g. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja
- h. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- i. Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- j. Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi Pemerintah
- k. Menindaklanjuti rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 22  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah  
(2021 - 2026)

Sasaran III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
		Triwulan II Tahun 2024	realisasi sampai dengan tahun Tahun 2024	

Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,50	78,50	80	98,12%
------------------------------	-------	-------	----	--------

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja sampai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu 78,50 (BB) belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 begitu juga dengan target Renstra. Hal ini karena evaluasi yang dilakukan masih sampai dengan triwulan II Tahun 2024. Olehnya itu beberapa hal yang telah dilakukan Hal tersebut dapat dicapai karena adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Coaching Clinic untuk penguatan SAKIP OPD dan Pemda. Dampaknya yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung SAKIP dan beberapa Rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh OPD. Diantaranya yaitu Reviu Dokumen Renstra, Perbaikan Perjanjian Kinerja dengan melengkapi dengan defenisi operasional, perbaikan dokumen LKJ sesuai sistematika Permenpan 53 Tahun 2014, perbaikan Dokumen IKU dilengkapi dengan defenisi operasional dan formulasi dsb.

#### 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu :
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
  - Pelaksanaan tindak lanjut atas setiap rekomendasi LHE Inspektorat dan LHE Kementerian PAN-RB
  - Mereviu Kembali dokumen perencanaan PD
  - Penetapan target kinerja yang tepat
  - Rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB dan Inspektorat telah ditindaklanjuti
- ❖ **Hambatan/Kendala**  
 Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :
  - Data pendukung dari bidang teknis belum maksimal

- Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward sehingga hasil pengukuran kinerja tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan/penambahan penghasilan
- Belum adanya aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
- Untuk dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan terkait regulasi penetapan punishment dan reward untuk dijadikan sebagai payung hukum

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

---

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- a. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan perbaikan sehingga layak untuk digunakan Kembali.
- b. Terdapat harga satuan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang bisa digunakan untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan kantor.

❖ **Efisiensi Sumber Daya**

- a. Keterbatasan jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dengan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan tenaga upah jasa TRC dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

## ❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

**Tabel. 23**  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran III :	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target Tahun 2024	Realisasi s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Triwulan III TA. 2024	Realisasi Triwulan II TA. 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	83,06	78,50	94,51	3.088.071.883,-	2.395.938.747,-	77,59%

Catatan : Realisasi s.d Triwulan III TA.2024 (Baseline Nilai SAKIP Triwulan II Tahun 2024)

**Tabel. 24**  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran III	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	94,51	77,59%	22,41%

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 94,51% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 77,59%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 22,41%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

##### ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

**Indikator Program adalah** Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan**. Target 100% dan realisasi 90,39% dengan capaian kinerja 90,39%, dan menyerap anggaran sebesar 77,59%. Capaian kinerja program tidak mencapai target karena terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya kinerjanya <100%, sehingga

berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan. Seperti pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan, hal ini karena adanya beberapa jabatan fungsional yang belum terisi ASN. Demikian halnya dengan sub kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan kantor yang realisasinya disesuaikan dengan kondisi kendaraan dan peralatan yang memerlukan perbaikan. Penyebab lainnya adalah keterlambatan proses pengadaan melalui e-catalog, seperti pada sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang belum terealisasi dan masih dalam proses pengadaan.

### Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

**Tabel. 25**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Target s.d TW III TA. 2024	Realisasi s.d TW III TA. 2024	Capaian (%)
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	90,39%	90,39%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	8 Dok	8 Dok	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	96,87%	96,87%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan	16 Org	16	15 Org	93,75%

			tunjangan				
<b>b.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	14 Dok	14 Dok	100%
<b>3.</b>	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%
<b>a.</b>	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	3 Dok	3 Dok	100%
<b>4.</b>	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	100%	100%
<b>a.</b>	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	18 Org	9 Org	9 Org	100 %
<b>5.</b>	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	110,18%	110,18%
<b>a.</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	7 Jenis	87,5%
<b>b.</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	19 Jenis	95%
<b>c.</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%
<b>d.</b>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	45 Expl	45 Expl	100%
<b>e.</b>	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	330 Org	282 Org	245 Org	87,18%
<b>f.</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	41 Kali	35 Kali	67 Kali	191,4%
<b>6.</b>	Kegiatan Pengadaan Barang	Terpenuhinya kebutuhan barang	Persentase BMD-Perangkat Daerah	100%	100%	33,33%	33,33%

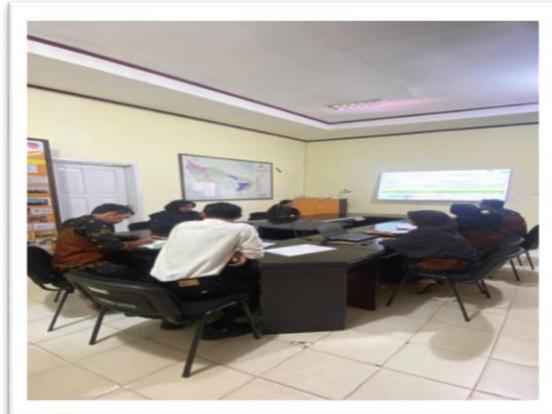
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	penunjang yang terpenuhi				
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas perorangan atau jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
b.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah mebel yang diadakan	4 Unit	4 Unit	0 Unit	0%
c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	4 Unit	4 Unit	0 Unit	0%
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	94,55%	94,55%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	400 Surat	300 Surat	251 Surat	83,66%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	36 Rek	27 Rek	27 Rek	100 %
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Org	2 Org	2 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	88,22%	88,22%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	13	9 Unit	69,23%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	22 Unit	21 Unit	95,45%
c.	Pemeliharaan/Reha	Terpeliharanya	Jumlah Gedung	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%

bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				
---	--	--	--	--	--	--

**Dokumentasi Kegiatan Penunjang SKPD**



**Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Monev Internal OPD Triwulan I TA. 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMU TIMUR  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Hali 92961  
E-mail : bpdkablumutimur@gmail.com

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Hari/Tanggal : 04 Juli 2024  
Pukul : 09.00 - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor BPBD  
Perihal : **Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II TA. 2024**

No	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1					
2	Meti Jumanik	L	Kabid		
3	Maria Citret	L	Kabid II		
4	Sapriana Dary	L	Kabid I		
5	Chalita	L	Staf		
6	SAMSAL ABDULLAH	L	Kabid		
7	M. Hani	L	Staf		
8	Benedictus	L	Staf		
9	Accounty K	P	Staf		
10	Accounty M	P	Staf		
11	Accounty N	P	Staf		
12	Accounty O	P	Staf		
13	Accounty P	P	Staf		
14	Accounty Q	P	Staf		
15	Accounty R	P	Staf		
16	Accounty S	P	Staf		
17	Accounty T	P	Staf		
18	Accounty U	P	Staf		
19	Accounty V	P	Staf		
20	Accounty W	P	Staf		



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Monev Internal OPD Triwulan II TA. 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUMU TIMUR  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Hali 92961  
E-mail : bpdkablumutimur@gmail.com

Mali, 01 Oktober 2024

Nomor : 300.2/145 /BPBD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lbr  
Hal : **Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan III TA. 2024**

Yth. 1. Sekretaris BPBD  
2. Para Kepala Bidang  
3. Para Kepala Sub Bagian  
4. Para Pejabat Fungsional & Staf  
Lingkup BPBD masing-masing

di- Tempat

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lumu Timur Nomor : 000.7/454/BPBD/bangda tanggal 26 September 2024 tentang Evaluasi Triwulan III Pelaksanaan RKPD TA. 2024 serta persiapan Evaluasi Kinerja Triwulan III TA. 2024 oleh Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Lumu Timur, maka ditugaskan kepada setiap bidang dan sekretariat BPBD untuk segera melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Internal dengan berpedoman pada DPA-SKPD TA. 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan mempersiapkan data/informasi sesuai daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka jadwal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis dan Jumat/03 & 04 Oktober 2024  
Waktu : 09.00 - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor BPBD Kab. Lumu Timur

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMU TIMUR**  
PEMBA UTAMA MUDA  
No. 11 Kes  
Pembina Utama Muda  
19670707 200012 1 002

Lampiran 1 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumu Timur  
Nomor : 000.3.6/ /BPBD  
Tanggal : 01 Oktober 2024  
Perihal : **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan III TA. 2024**

No.	Bahan Monev	Keterangan
1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
2.	Rencana Aksi Tahun 2024	
3.	Formulir Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024	
4.	Pernyataan Telah Dievaluasi	
5.	Rekomendasi Evaluasi Triwulan III Tahun 2024	
6.	Format 1 (LRA)	
7.	Format 7 (Pemasalahan & Solusi)	
8.	Laporan Kinerja Triwulan III TA. 2024	

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMU TIMUR**  
PEMBA UTAMA MUDA  
No. 11 Kes  
Pembina Utama Muda  
19670707 200012 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LUMU TIMUR  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Hali 92961  
E-mail : bpdkablumutimur@gmail.com

**DAFTAR HADIR RAPAT**

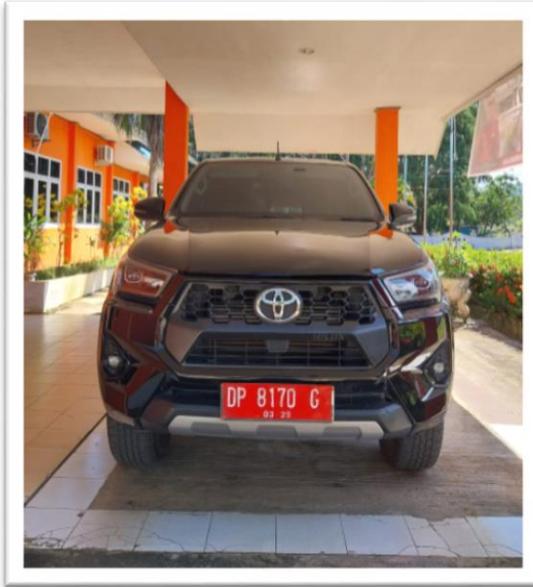
Hari/Tanggal : 04 Oktober 2024  
Pukul : 09.00 - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor BPBD  
Perihal :

No	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1					
2	Meti Jumanik	L	Kabid		
3					
4	CHALITA	L	Kabid Perencanaan		
5	SAMSAL ABDULLAH	L	Kabid		
6	M. Hani	L	Staf		
7	Benedictus	L	Staf		
8	Accounty K	P	Staf		
9	Accounty M	P	Staf		
10	Accounty N	P	Staf		
11	Accounty O	P	Staf		
12	Accounty P	P	Staf		
13	Accounty Q	P	Staf		
14	Accounty R	P	Staf		
15	Accounty S	P	Staf		
16	Accounty T	P	Staf		
17	Accounty U	P	Staf		
18	Accounty V	P	Staf		
19	Accounty W	P	Staf		
20	Accounty X	P	Staf		

Penyaji Rapat



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Money Internal OPD Triwulan III TA. 2024



Dokumentasi Pengadaan Kendaraan Dinas



Pengadaan AC ½ PK



Pengadaan AC 1 PK

## 7. KESIMPULAN

---

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu 94,51% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$= \frac{78,50}{83,06} \times 100$$

$$= 94,51\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 3.088.071.883,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.395.938.747,-** atau **77,59%**.

### 3.3 Realisasi Anggaran

---

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah sebesar sebesar **Rp. 5.172.606.050,-** (*Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Puluh Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 2.146.665.782,-** belanja barang dan jasa **Rp. 1.820.552.768,-** dan belanja modal **Rp 814.650.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program, 12 kegiatan serta 38 sub kegiatan. Dan sampai dengan triwulan III TA. 2024, anggaran yang disediakan sebesar **Rp 4.534.598.843,-** dan terealisasi **Rp 2.894.181.864,- (63,82%)**. Untuk target dan realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



**Grafik. 10**  
Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2024

**Tabel. 26**  
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran Pokok Rp	Jumlah Target Triwulan I, II, III (Berdasarkan Anggaran Kas)		Jumlah Realisasi TW I, II dan III		Selisih		Sisa Anggaran	
			(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
	2	4	5		6	7	8	9	10	11
						$(\frac{6}{5} \times 100)$	$(5-6)$	$(\frac{8}{5} \times 100)$	$(4-6)$	$(\frac{10}{4} \times 100)$
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.172.606.050	4.534.598.843	87,67	2.894.181.726	63,82	1.640.417.117	36,18	2.278.424.324	44,05
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.539.355.020	3.088.071.883	87,25	2.395.938.609	77,59	692.133.274	22,41	1.143.416.411	32,31
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.067.880	69.043.130	86,23	36.128.701	52,33	32.914.429	47,67	43.939.179	54,88
1	<i>Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>37.836.840</i>	<i>35.586.840</i>	<i>94,05</i>	<i>20.178.749</i>	<i>56,70</i>	15.408.091	<i>43,30</i>	17.658.091	<i>46,67</i>
	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	9.000.000	6.750.000	75,00	6.000.000	88,89	750.000	11,11	3.000.000	33,33
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.145.770	1.145.770	100,00	507.985	44,34	637.785	55,66	637.785	55,66
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	459.070	459.070	100,00	430.780	93,84	28.290	6,16	28.290	6,16
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.750.000	2.750.000	100,00	1.206.284	43,86	1.543.716	56,14	1.543.716	56,14
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.662.000	1.662.000	100,00	797.700	48,00	864.300	52,00	864.300	52,00

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	6.000.000	100,00	-	-	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.820.000	16.820.000	100,00	11.236.000	66,80	5.584.000	33,20	5.584.000	33,20
<b>2</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>5.852.560</b>	<b>5.852.560</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.852.560</b>	<b>100,00</b>	<b>5.852.560</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.169.990	1.169.990	100,00	-	-	1.169.990	100,00	1.169.990	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	390.570	390.570	100,00	-	-	390.570	100,00	390.570	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.200.000	1.200.000	100,00	-	-	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.292.000	1.292.000	100,00	-	-	1.292.000	100,00	1.292.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	1.800.000	100,00	-	-	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00
<b>3</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	<b>4.365.200</b>	<b>2.468.700</b>	<b>56,55</b>	<b>1.637.700</b>	<b>66,34</b>	<b>831.000</b>	<b>33,66</b>	<b>2.727.500</b>	<b>62,48</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	353.700	353.700	100,00	353.700	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	218.500	218.500	100,00	202.500	92,68	16.000	7,32	16.000	7,32
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.550.000	1.275.000	50,00	851.500	66,78	423.500	33,22	1.698.500	66,61
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.243.000	621.500	50,00	230.000	37,01	391.500	62,99	1.013.000	81,50
<b>4</b>	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>32.013.280</b>	<b>25.135.030</b>	<b>78,51</b>	<b>14.312.252</b>	<b>56,94</b>	<b>10.822.778</b>	<b>43,06</b>	<b>17.701.028</b>	<b>55,29</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.322.710	1.322.710	100,00	657.100	49,68	665.610	50,32	665.610	50,32
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	457.570	457.570	100,00	433.570	94,75	24.000	5,25	24.000	5,25
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.000.000	2.250.000	75,00	1.385.582	61,58	864.418	38,42	1.614.418	53,81
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.993.000	2.244.750	75,00	460.000	20,49	1.784.750	79,51	2.533.000	84,63
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	3.600.000	75,00	598.000	16,61	3.002.000	83,39	4.202.000	87,54
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.440.000	15.260.000	78,50	10.778.000	70,63	4.482.000	29,37	8.662.000	44,56
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.145.998.382</b>	<b>1.818.666.262</b>	<b>84,75</b>	<b>1.397.930.355</b>	<b>76,87</b>	<b>420.735.907</b>	<b>23,13</b>	<b>748.068.027</b>	<b>34,86</b>
<b>5</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.100.465.782</b>	<b>1.781.730.062</b>	<b>84,83</b>	<b>1.375.509.615</b>	<b>77,20</b>	<b>406.220.447</b>	<b>22,80</b>	<b>724.956.167</b>	<b>34,51</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	776.540.982	709.776.884	91,40	572.167.500	80,61	137.609.384	19,39	204.373.482	26,32
	Belanja Gaji Pokok PPPK	48.774.810	43.897.329	90,00	35.239.600	80,28	8.657.729	19,72	13.535.210	27,75
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	76.463.119	68.816.807	90,00	52.781.373	76,70	16.035.434	23,30	23.681.746	30,97
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.516.966	4.965.269	90,00	-	-	4.965.269	100,00	5.516.966	100,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	128.590.000	115.731.000	90,00	92.935.000	80,30	22.796.000	19,70	35.655.000	27,73
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.680.000	20.412.000	90,00	-	-	20.412.000	100,00	22.680.000	100,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.590.000	2.331.000	90,00	1.850.000	79,37	481.000	20,63	740.000	28,57
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.457.625	13.011.863	90,00	4.755.000	36,54	8.256.863	63,46	9.702.625	67,11
	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.554.840	47.299.356	90,00	30.199.140	63,85	17.100.216	36,15	22.355.700	42,54
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.041.640	2.737.476	90,00	796.620	29,10	1.940.856	70,90	2.245.020	73,81
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.675.000	4.207.500	28,67	7.151.802	169,98	(2.944.302)	(69,98)	7.523.198	51,27
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.500.000	1.260.000	36,00	86.528	6,87	1.173.472	93,13	3.413.472	97,53
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.400	44.460	90,00	9.660	21,73	34.800	78,27	39.740	80,45
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.400	1.260	90,00	879	69,76	381	30,24	521	37,21
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	905.940.000	711.810.000	78,57	571.988.206	80,36	139.821.794	19,64	333.951.794	36,86

	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.130.000	8.745.000	78,57	5.548.307	63,45	3.196.693	36,55	5.581.693	50,15
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	33.960.000	26.682.858	78,57	-	-	26.682.858	100,00	33.960.000	100,00
<b>6</b>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	<u>45.532.600</u>	<u>36.936.200</u>	<u>81,12</u>	<u>22.420.740</u>	<u>60,70</u>	14.515.460	<u>39,30</u>	23.111.860	<u>50,76</u>
	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	19.800.000	14.850.000	75,00	14.800.000	99,66	50.000	0,34	5.000.000	25,25
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.585.600	1.939.200	75,00	1.272.040	65,60	667.160	34,40	1.313.560	50,80
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.324.000	1.324.000	100,00	647.000	48,87	677.000	51,13	677.000	51,13
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.145.000	1.145.000	100,00	488.600	42,67	656.400	57,33	656.400	57,33
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.838.000	1.838.000	100,00	1.089.900	59,30	748.100	40,70	748.100	40,70
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	1.500.000	100,00	-	-	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.000.000	9.000.000	75,00	-	-	9.000.000	100,00	12.000.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.340.000	5.340.000	100,00	4.123.200	77,21	1.216.800	22,79	1.216.800	22,79
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.326.300</b>	<b>17.176.300</b>	<b>84,50</b>	<b>8.400.000</b>	<b>48,90</b>	<b>8.776.300</b>	<b>51,10</b>	<b>11.926.300</b>	<b>58,67</b>
<b>7</b>	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<u>20.326.300</u>	<u>17.176.300</u>	<u>84,50</u>	<u>8.400.000</u>	<u>48,90</u>	8.776.300	<u>51,10</u>	11.926.300	<u>58,67</u>
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.600.000	9.450.000	75,00	8.400.000	88,89	1.050.000	11,11	4.200.000	33,33
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	543.300	543.300	100,00	-	-	543.300	100,00	543.300	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	347.000	347.000	100,00	-	-	347.000	100,00	347.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	644.000	644.000	100,00	-	-	644.000	100,00	644.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	912.000	912.000	100,00	-	-	912.000	100,00	912.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.280.000	5.280.000	100,00	-	-	5.280.000	100,00	5.280.000	100,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>35.500.000</b>	<b>32.890.000</b>	<b>92,65</b>	<b>21.969.500</b>	<b>66,80</b>	<b>10.920.500</b>	<b>33,20</b>	<b>13.530.500</b>	<b>38,11</b>
<b>8</b>	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<u>35.500.000</u>	<u>32.890.000</u>	<u>92,65</u>	<u>21.969.500</u>	<u>66,80</u>	10.920.500	<u>33,20</u>	13.530.500	<u>38,11</u>
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000	15.000.000	100,00	10.770.000	71,80	4.230.000	28,20	4.230.000	28,20
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.500.000	17.890.000	87,27	11.199.500	62,60	6.690.500	37,40	9.300.500	45,37
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>396.921.800</b>	<b>330.694.705</b>	<b>83,31</b>	<b>283.647.122</b>	<b>85,77</b>	<b>47.047.583</b>	<b>14,23</b>	<b>113.274.678</b>	<b>28,54</b>
<b>9</b>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<u>12.625.000</u>	<u>9.468.750</u>	<u>75,00</u>	<u>4.676.000</u>	<u>49,38</u>	4.792.750	<u>50,62</u>	7.949.000	<u>62,96</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.625.000	9.468.750	75,00	4.676.000	49,38	4.792.750	50,62	7.949.000	62,96
<b>10</b>	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<u>24.994.500</u>	<u>18.745.875</u>	<u>75,00</u>	<u>12.800.000</u>	<u>68,28</u>	5.945.875	<u>31,72</u>	12.194.500	<u>48,79</u>
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.407.000	13.055.250	75,00	9.565.000	73,27	3.490.250	26,73	7.842.000	45,05
	<i>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</i>	7.587.500	5.690.625	75,00	3.235.000	56,85	2.455.625	43,15	4.352.500	57,36
<b>11</b>	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</i>	<u>24.867.500</u>	<u>22.410.000</u>	<u>90,12</u>	<u>12.425.000</u>	<u>55,44</u>	9.985.000	<u>44,56</u>	12.442.500	<u>50,04</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	24.867.500	22.410.000	90,12	12.425.000	55,44	9.985.000	44,56	12.442.500	50,04

	Kantor-Bahan Cetak									
<b>12</b>	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<u>6.720.000</u>	<u>5.040.000</u>	<u>75,00</u>	<u>4.020.000</u>	<u>79,76</u>	1.020.000	<u>20,24</u>	2.700.000	<u>40,18</u>
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.720.000	5.040.000	75,00	4.020.000	79,76	1.020.000	20,24	2.700.000	40,18
<b>13</b>	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<u>18.150.000</u>	<u>15.500.000</u>	<u>85,40</u>	<u>5.650.000</u>	<u>36,45</u>	9.850.000	<u>63,55</u>	12.500.000	<u>68,87</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.150.000	15.500.000	85,40	<b>5.650.000</b>	36,45	9.850.000	63,55	12.500.000	68,87
<b>14</b>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<u>309.564.800</u>	<u>259.530.080</u>	<u>83,84</u>	<u>244.076.122</u>	<u>94,05</u>	15.453.958	<u>5,95</u>	65.488.678	<u>21,16</u>
	Belanja Jasa Tenaga Supir	36.000.000	27.000.000	75,00	12.000.000	44,44	15.000.000	55,56	24.000.000	66,67
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	273.564.800	232.530.080	85,00	232.076.122	99,80	453.958	0,20	41.488.678	15,17
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>658.000.000</b>	<b>658.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>565.438.000</b>	<b>85,93</b>	92.562.000	14,07	<b>92.562.000</b>	14,07
<b>15</b>	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<u>555.500.000</u>	<u>555.500.000</u>	<u>100,00</u>	<u>549.838.000</u>	<u>98,98</u>	5.662.000	<u>1,02</u>	5.662.000	<u>1,02</u>
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang ( <b>MOBIL</b> )	555.500.000	555.500.000	100,00	549.838.000	98,98	5.662.000	1,02	5.662.000	1,02
<b>16</b>	<i>Pengadaan Mebel</i>	<u>26.500.000</u>	<u>26.500.000</u>	<u>100,00</u>	-	-	26.500.000	<u>100,00</u>	26.500.000	<u>100,00</u>
	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor ( <b>FILLING KABINET 1 unit, LEMARI ARSIP 3 unit</b> )	26.500.000	26.500.000	100,00	-	-	26.500.000	100,00	26.500.000	100,00
<b>17</b>	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<u>59.000.000</u>	<u>59.000.000</u>	<u>100,00</u>	-	-	59.000.000	<u>100,00</u>	59.000.000	<u>100,00</u>
-	<i>Belanja Modal Alat Pembersih (MESIN BABAT 1 unit)</i>	5.000.000	5.000.000	100,00	-	-	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
	Belanja Modal Personal Computer ( <b>KOMPUTER/PC 3 unit</b> )	54.000.000	54.000.000	100,00	-	-	54.000.000	100,00	54.000.000	100,00
<b>18</b>	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<u>17.000.000</u>	<u>17.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>15.600.000</u>	<u>91,76</u>	1.400.000	<u>8,24</u>	1.400.000	<u>8,24</u>
	Belanja Modal Alat Pendingin ( <b>AC 1/2 Pk 2 Unit, AC 1Pk 1 Unit</b> )	17.000.000	17.000.000	100,00	15.600.000	91,76	1.400.000	8,24	1.400.000	8,24
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79.820.658</b>	<b>60.915.486</b>	<b>76,32</b>	<b>47.045.931</b>	<b>77,23</b>	13.869.555	22,77	32.774.727	41,06
<b>19</b>	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<u>4.199.970</u>	<u>4.199.970</u>	<u>100,00</u>	<u>2.405.395</u>	<u>57,27</u>	1.794.575	<u>42,73</u>	1.794.575	<u>42,73</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.175.340	2.175.340	100,00	1.373.895	63,16	801.445	36,84	801.445	36,84
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	462.630	462.630	100,00	306.500	66,25	156.130	33,75	156.130	33,75
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	100,00	500.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	912.000	912.000	100,00	225.000	24,67	687.000	75,33	687.000	75,33
	Belanja Paket/Pengiriman	150.000	150.000	100,00	-	-	150.000	100,00	150.000	100,00
<b>20</b>	<i>Penyediaan Jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<u>55.820.688</u>	<u>41.865.516</u>	<u>75,00</u>	<u>31.840.536</u>	<u>76,05</u>	10.024.980	<u>23,95</u>	23.980.152	<u>42,96</u>
	Belanja Tagihan Telpon	1.800.000	1.350.000	75,00	998.400	73,96	351.600	26,04	801.600	44,53
	Belanja Tagihan Air	6.004.800	4.503.600	75,00	3.079.900	68,39	1.423.700	31,61	2.924.900	48,71
	Belanja Tagihan Listrik	48.015.888	36.011.916	75,00	27.762.236	77,09	8.249.680	22,91	20.253.652	42,18
<b>21</b>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<u>19.800.000</u>	<u>14.850.000</u>	<u>75,00</u>	<u>12.800.000</u>	<u>86,20</u>	2.050.000	<u>13,80</u>	7.000.000	<u>35,35</u>
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.800.000	3.600.000	75,00	2.800.000	77,78	800.000	22,22	2.000.000	41,67
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.000.000	11.250.000	75,00	10.000.000	88,89	1.250.000	11,11	5.000.000	33,33

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah</b>	<b>122.720.000</b>	<b>100.686.000</b>	<b>82,05</b>	<b>35.379.000</b>	<b>35,14</b>	65.307.000	64,86	87.341.000	71,17
<b>22</b>	<u>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</u>	<u>93.300.000</u>	<u>74.600.000</u>	<u>79,96</u>	<u>22.905.000</u>	<u>30,70</u>	51.695.000	<u>69,30</u>	70.395.000	<u>75,45</u>
-	Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan	11.600.000	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	11.600.000	100,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.800.000	9.600.000	75,00	1.965.000	20,47	7.635.000	79,53	10.835.000	84,65
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	68.900.000	65.000.000	94,34	20.940.000	32,22	44.060.000	67,78	47.960.000	69,61
<b>23</b>	<u>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	<u>19.540.000</u>	<u>17.586.000</u>	<u>90,00</u>	<u>6.830.000</u>	<u>38,84</u>	10.756.000	<u>61,16</u>	12.710.000	<u>65,05</u>
	Belanja Pemeliharaan Alat Berat-Alat Bantu-ElectrikGenerating Set	4.500.000	4.050.000	90,00	-	-	4.050.000	100,00	4.500.000	100,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor -Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	1.400.000	1.260.000	90,00	900.000	71,43	360.000	28,57	500.000	35,71
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (chainsaw, tenda, mesin babat)	2.800.000	2.520.000	90,00	2.420.000	96,03	100.000	3,97	380.000	13,57
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Pendingin	3.000.000	2.700.000	90,00	600.000	22,22	2.100.000	77,78	2.400.000	80,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Komputer/PC, Laptop)	5.840.000	5.256.000	90,00	2.910.000	55,37	2.346.000	44,63	2.930.000	50,17
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer -Peralatan Personal Computer (Printer)	2.000.000	1.800.000	90,00	-	-	1.800.000	100,00	2.000.000	100,00
<b>24</b>	<u>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</u>	<u>9.880.000</u>	<u>8.500.000</u>	<u>86,03</u>	<u>5.644.000</u>	<u>66,40</u>	2.856.000	<u>33,60</u>	4.236.000	<u>42,87</u>
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.880.000	8.500.000	86,03	5.644.000	66,40	2.856.000	33,60	4.236.000	42,87
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.633.251.030</b>	<b>1.446.526.960</b>	<b>921,38</b>	<b>498.243.117</b>	<b>34,44</b>	948.283.843	65,56	1.135.007.913	69,49
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>116.395.070</b>	<b>116.395.070</b>	<b>100,00</b>	<b>24.923.860</b>	<b>21,41</b>	91.471.210	78,59	91.471.210	78,59
<b>25</b>	<u>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</u>	<u>116.395.070</u>	<u>116.395.070</u>	<u>100,00</u>	<u>24.923.860</u>	<u>21,41</u>	91.471.210	<u>78,59</u>	91.471.210	<u>78,59</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	4.047.500	4.047.500	100,00	3.896.310	96,26	151.190	3,74	151.190	3,74
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	180.570	180.570	100,00	168.550	93,34	12.020	6,66	12.020	6,66
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	755.000	755.000	100,00	528.000	69,93	227.000	30,07	227.000	30,07
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	532.000	532.000	100,00	450.000	84,59	82.000	15,41	82.000	15,41
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000	11.000.000	100,00	10.917.500	99,25	82.500	0,75	82.500	0,75
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.500.000	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.080.000	1.080.000	100,00	1.080.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Hotel	900.000	900.000	100,00	900.000	100,00	-	-	-	-

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000	1.500.000	100,00	1.483.500	98,90	16.500	1,10	16.500	1,10
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (PAPAN HIMBAUAN 3 Unit)	90.900.000	90.900.000	100,00	-	-	90.900.000	100,00	90.900.000	100,00
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>257.723.360</b>	<b>257.723.360</b>	<b>100,00</b>	<b>66.331.780</b>	<b>25,74</b>	<b>191.391.580</b>	<b>74,26</b>	<b>191.391.580</b>	<b>74,26</b>
<b>26</b>	<u>Penyusunan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Desa Tangguh Bencana)</u>	<u>57.937.060</u>	<u>57.937.060</u>	<u>100,00</u>	-	-	57.937.060	<u>100,00</u>	57.937.060	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	434.420	434.420	100,00	-	-	434.420	100,00	434.420	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	580.640	580.640	100,00	-	-	580.640	100,00	580.640	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.230.000	1.230.000	100,00	-	-	1.230.000	100,00	1.230.000	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	542.000	542.000	100,00	-	-	542.000	100,00	542.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.200.000	13.200.000	100,00	-	-	13.200.000	100,00	13.200.000	<u>100,00</u>
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.750.000	23.750.000	100,00	-	-	23.750.000	100,00	23.750.000	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.080.000	1.080.000	100,00	-	-	1.080.000	100,00	1.080.000	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Hotel	5.400.000	5.400.000	100,00	-	-	5.400.000	100,00	5.400.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.720.000	11.720.000	100,00	-	-	11.720.000	100,00	11.720.000	<u>100,00</u>
<b>27</b>	<u>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</u>	<u>35.877.450</u>	<u>35.877.450</u>	<u>100,00</u>	<u>29.619.680</u>	<u>82,56</u>	<u>6.257.770</u>	<u>17,44</u>	<u>6.257.770</u>	<u>17,44</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	919.880	919.880	100,00	881.900	95,87	37.980	4,13	37.980	<u>4,13</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	105.570	105.570	100,00	99.780	94,52	5.790	5,48	5.790	<u>5,48</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.510.000	1.510.000	100,00	1.038.400	68,77	471.600	31,23	471.600	<u>31,23</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	162.000	162.000	100,00	150.000	92,59	12.000	7,41	12.000	<u>7,41</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.800.000	8.800.000	100,00	6.669.600	75,79	2.130.400	24,21	2.130.400	<u>24,21</u>
	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	5.000.000	5.000.000	100,00	3.700.000	74,00	1.300.000	26,00	1.300.000	<u>26,00</u>
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.080.000	1.080.000	100,00	-	-	1.080.000	100,00	1.080.000	<u>100,00</u>
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Hotel	1.800.000	1.800.000	100,00	1.500.000	83,33	300.000	16,67	300.000	<u>16,67</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000	3.500.000	100,00	2.580.000	73,71	920.000	26,29	920.000	<u>26,29</u>
<b>28</b>	<u>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</u>	<u>37.138.100</u>	<u>37.138.100</u>	<u>100,00</u>	<u>36.712.100</u>	<u>98,85</u>	<u>426.000</u>	<u>1,15</u>	<u>426.000</u>	<u>1,15</u>
	Belanja Bahan bahan lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00	4.677.000	93,54	323.000	6,46	323.000	<u>6,46</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	271.530	271.530	100,00	271.530	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	228.570	228.570	100,00	228.570	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.175.000	1.175.000	100,00	1.175.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	613.000	613.000	100,00	550.000	89,72	63.000	10,28	63.000	<u>10,28</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000	16.200.000	100,00	16.200.000	100,00	-	-	-	-
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa	8.250.000	8.250.000	100,00	8.250.000	100,00	-	-	-	-

	Acara, dan Panitia									
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.200.000	1.200.000	100,00	1.160.000	96,67	40.000	3,33	40.000	<u>3,33</u>
	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Hotel	2.700.000	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00	-	-	-	-
<b>29</b>	<b><u>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</u></b>	<b><u>61.020.750</u></b>	<b><u>61.020.750</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.020.750</b>	<b><u>100,00</u></b>	<b>61.020.750</b>	<b><u>100,00</u></b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.781.680	1.781.680	100,00	-	-	1.781.680	100,00	1.781.680	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	187.070	187.070	100,00	-	-	187.070	100,00	187.070	<u>100,00</u>
	Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	1.440.000	1.440.000		-	-	1.440.000	100,00	1.440.000	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	532.000	532.000	100,00	-	-	532.000	100,00	532.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.300.000	7.300.000	100,00	-	-	7.300.000	100,00	7.300.000	<u>100,00</u>
	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	11.500.000	11.500.000	100,00	-	-	11.500.000	100,00	11.500.000	<u>100,00</u>
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.500.000	11.500.000	100,00	-	-	11.500.000	100,00	11.500.000	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11.080.000	11.080.000	100,00	-	-	11.080.000	100,00	11.080.000	<u>100,00</u>
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	3.000.000	3.000.000		-	-	-	-	3.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Hotel	5.400.000	5.400.000	100,00	-	-	5.400.000	100,00	5.400.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.300.000	7.300.000	100,00	-	-	7.300.000	100,00	7.300.000	<u>100,00</u>
<b>30</b>	<b><u>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</u></b>	<b><u>65.750.000</u></b>	<b><u>65.750.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.750.000</b>	<b><u>100,00</u></b>	<b>65.750.000</b>	<b><u>100,00</u></b>
	Belanja Modal Alat kantor lainnya (Chainsaw 2 Unit)	35.000.000	35.000.000	100,00	-	-	35.000.000	100,00	35.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Modal Alat SAR Lainnya (Helm safety 15 bh, jasa hujan 30 bh, sepatu Boat 30 psg)	30.750.000	30.750.000	100,00	-	-	30.750.000	100,00	30.750.000	<u>100,00</u>
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>752.737.140</b>	<b>583.623.070</b>	<b>425,51</b>	<b>379.318.250</b>	<b>64,99</b>	<b>204.304.820</b>	<b>35,01</b>	<b>373.418.890</b>	<b><u>49,61</u></b>
<b>31</b>	<b><u>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</u></b>	<b><u>625.230.900</u></b>	<b><u>471.167.530</u></b>	<b>75,36</b>	<b>351.543.800</b>	<b>74,61</b>	<b>119.623.730</b>	<b>25,39</b>	<b>273.687.100</b>	<b><u>43,77</u></b>
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.400.000	6.300.000	75,00	1.196.000	18,98	5.104.000	81,02	7.204.000	<u>85,76</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	317.900	222.530	70,00	-	-	222.530	100,00	317.900	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	574.000	574.000	100,00	-	-	574.000	100,00	574.000	<u>100,00</u>
	Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	175.000	175.000	100,00	-	-	175.000	100,00	175.000	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	324.000	324.000	100,00	250.000	77,16	74.000	22,84	74.000	<u>22,84</u>
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	602.160.000	451.620.000	75,00	340.680.000	75,44	110.940.000	24,56	261.480.000	<u>43,42</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.280.000	11.952.000	90,00	9.417.800	78,80	2.534.200	21,20	3.862.200	<u>29,08</u>
<b>32</b>	<b><u>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</u></b>	<b><u>39.175.000</u></b>	<b><u>33.317.050</u></b>	<b>85,05</b>	<b><u>11.278.000</u></b>	<b>33,85</b>	<b>22.039.050</b>	<b>66,15</b>	<b>27.897.000</b>	<b><u>71,21</u></b>
	Belanja Bahan-Bahan Dan Pelumas	15.170.000	13.501.300	89,00	2.300.000	17,04	11.201.300	82,96	12.870.000	<u>84,84</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	1.500.000	75,00	-	-	1.500.000	100,00	2.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.925.000	1.443.750	75,00	-	-	1.443.750	100,00	1.925.000	<u>100,00</u>

	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.000.000	6.000.000	75,00	-	-	6.000.000	100,00	8.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.080.000	10.872.000	90,00	8.978.000	82,58	1.894.000	17,42	3.102.000	<u>25,68</u>
<b>33</b>	<b><u>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</u></b>	<b><u>39.073.600</u></b>	<b><u>36.008.000</u></b>	<b>92,15</b>	<b><u>16.496.450</u></b>	<b>45,81</b>	<b>19.511.550</b>	<b>54,19</b>	<b>22.577.150</b>	<b><u>57,78</u></b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	258.600	258.600	100,00	-	-	258.600	100,00	258.600	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	562.000	562.000	100,00	-	-	562.000	100,00	562.000	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	993.000	993.000	100,00	580.000	58,41	413.000	41,59	413.000	<u>41,59</u>
	Belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	10.000.000	8.000.000	80,00	-	-	8.000.000	100,00	10.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000	5.000.000	100,00	-	-	5.000.000	100,00	5.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4.500.000	4.500.000	100,00	-	-	4.500.000	100,00	4.500.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.760.000	16.694.400	94,00	15.916.450	95,34	777.950	4,66	1.843.550	<u>10,38</u>
<b>34</b>	<b><u>Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit</u></b>	<b><u>28.797.040</u></b>	<b><u>26.747.040</u></b>	<b>92,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.747.040</b>	<b>100,00</b>	<b>28.797.040</b>	<b><u>100,00</u></b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	524.400	524.400	100,00	-	-	524.400	100,00	524.400	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	610.640	610.640	100,00	-	-	610.640	100,00	610.640	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	162.000	162.000	100,00	-	-	162.000	100,00	162.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	4.000.000	100,00	-	-	4.000.000	100,00	4.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000	3.000.000	100,00	-	-	3.000.000	100,00	3.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.500.000	18.450.000	90,00	-	-	18.450.000	100,00	20.500.000	<u>100,00</u>
<b>35</b>	<b><u>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</u></b>	<b><u>20.460.600</u></b>	<b><u>16.383.450</u></b>	<b>80,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.383.450</b>	<b>100,00</b>	<b>20.460.600</b>	<b><u>100,00</u></b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	230.600	172.950	75,00	-	-	172.950	100,00	230.600	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	321.000	321.000	100,00	-	-	321.000	100,00	321.000	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	669.000	334.500	50,00	-	-	334.500	100,00	669.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	3.000.000	75,00	-	-	3.000.000	100,00	4.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.500.000	4.500.000	100,00	-	-	4.500.000	100,00	4.500.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.740.000	8.055.000	75,00	-	-	8.055.000	100,00	10.740.000	<u>100,00</u>
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>506.395.460</b>	<b>488.785.460</b>	<b>295,86</b>	<b>27.669.227</b>	<b>5,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478.726.233</b>	<b><u>94,54</u></b>
<b>36</b>	<b><u>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (SOP&amp;Perbup)</u></b>	<b><u>18.139.860</u></b>	<b><u>18.139.860</u></b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.139.860</b>	<b>100,00</b>	<b>18.139.860</b>	<b><u>100,00</u></b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	571.790	571.790	100,00	-	-	571.790	100,00	571.790	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	324.070	324.070	100,00	-	-	324.070	100,00	324.070	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000	600.000	100,00	-	-	600.000	100,00	600.000	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.044.000	1.044.000	100,00	-	-	1.044.000	100,00	1.044.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	4.000.000	100,00	-	-	4.000.000	100,00	4.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.600.000	11.600.000	100,00	-	-	11.600.000	100,00	11.600.000	<u>100,00</u>
<b>37</b>	<b><u>Penyusunan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota (IKD)</u></b>	<b><u>62.553.580</u></b>	<b><u>62.553.580</u></b>	<b>100,00</b>	<b><u>605.020</u></b>	<b>0,97</b>	<b>61.948.560</b>	<b>99,03</b>	<b>61.948.560</b>	<b><u>99,03</u></b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.326.870	3.326.870	100,00	296.680	8,92	3.030.190	91,08	3.030.190	<u>91,08</u>

	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	329.710	329.710	100,00	308.340	93,52	21.370	6,48	21.370	<u>6,48</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	895.000	895.000	100,00	-	-	895.000	100,00	895.000	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	912.000	912.000	100,00	-	-	912.000	100,00	912.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000	8.500.000	100,00	-	-	8.500.000	100,00	8.500.000	<u>100,00</u>
	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	15.000.000	15.000.000	100,00	-	-	-	-	15.000.000	<u>100,00</u>
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.500.000	14.500.000	100,00	-	-	14.500.000	100,00	14.500.000	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.160.000	2.160.000	100,00	-	-	2.160.000	100,00	2.160.000	<u>100,00</u>
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	4.500.000	4.500.000	100,00	-	-	-	-	4.500.000	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Hotel	2.700.000	2.700.000	100,00	-	-	2.700.000	100,00	2.700.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.730.000	9.730.000	100,00	-	-	9.730.000	100,00	9.730.000	<u>100,00</u>
<b>38</b>	<b><i>Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota</i></b>	<b><u>425.702.020</u></b>	<b><u>408.092.020</u></b>	<b>95,86</b>	<b><u>27.064.207</u></b>	<b>6,63</b>	<b>381.027.813</b>	<b>93,37</b>	<b>398.637.813</b>	<b><u>93,64</u></b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	605.380	605.380	100,00	276.250	45,63	329.130	54,37	329.130	<u>54,37</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.024.140	1.024.140	100,00	306.350	29,91	717.790	70,09	717.790	<u>70,09</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	350.000	300.000	85,71	-	-	300.000	100,00	350.000	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	375.000	375.000	100,00	-	-	375.000	100,00	375.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	1.200.000	100,00	-	-	1.200.000	100,00	1.200.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.410.000	30.850.000	98,22	26.481.607	85,84	4.368.393	14,16	4.928.393	<u>15,69</u>
	Belanja Modal <b>Adm dan Pengawasan</b> jembatan pada jalan desa ( <b>Ds Kawata Kec. Wasuponda</b> )	89.737.500	84.737.500	94,43	-	-	84.737.500	100,00	89.737.500	<u>100,00</u>
	Belanja Modal <b>Adm dan Pengawasan</b> bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam ( <b>Rekonstruksi Tanggul Banjir Ds Iauwo Kec. Burau</b> )	301.000.000	289.000.000	96,01	-	-	289.000.000	100,00	301.000.000	<u>100,00</u>
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.172.606.050</b>	<b>4.534.598.843</b>	<b>87,67</b>	<b>2.894.181.726</b>	<b>63,82</b>	<b>1.640.417.117</b>	<b>36,18</b>	<b>2.278.424.324</b>	<b>44,05</b>

❖ **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran Triwulan II TA. 2024**

**Tabel.27**  
**Permasalahan dan Solusi**

KODE KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			-
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen. Berdasarkan anggaran kas, output sub kegiatan direncanakan pada triwulan III TA. 2023 sebanyak 2 dokumen dan telah terealisasi 2 dokumen yaitu dokumen renja pokok 2024 dan Renja Perubahan 2024 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas pada triwulan III sebesar Rp 35.586.840,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.178.949 atau sebesar 56,70%. Realisasi keuangan tidak mencapai target karena masih terdapat Belanja E-Catalog senilai Rp 1.455.620 dan belanja Honor Rp 750.000 yang baru akan diGU-kan bulan Oktober 2024. Sedangkan anggaran untuk perjalanan dinas disesuaikan dengan undangan/persuratan	Percepatan Realisasi Keuangan untuk belanja E-catalog
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen, direncanakan pada Triwulan III TA. 2024 dan terealisasi 100%.	Disediakan anggaran kas s.d Triwulan III sebesar Rp 5.852.560 dan realisasi masih 0% karena terdapat Belanja E-Catalog yang masih dalam proses GU	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Target output sub kegiatan s.d triwulan III yaitu tersusunnya dokumen DPA-SKPD Tahun 2024 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp 2.468.700,- dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.637.700,- atau sebesar 66,34%.	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target output sub kegiatan s.d triwulan III yaitu tersusunnya 8 dokumen yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2023, Laporan Evaluasi RKPD TW I TA. 2024, Laporan Evaluasi RKPD Triwulan II TA. 2024 dan Laporan Kinerja Triwulan I TA. 2024, Laporan Kinerja Triwulan II TA. 2024 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp 25.135.030,- Dan Realisasi sebesar Rp. 14.312.190 atau sebesar 56,94%. Terdapat belanja E-Catalog senilai Rp 1.513.020,- yang belum di-GU-kan sedangkan belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan undangan kegiatan terkait evaluasi.	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan

1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 16 org dan terealisasi hanya 15 org sehingga capaian kinerja 93,75 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan fungsional penyetaraan yang belum terisi ASN	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp 1.781.730.062,- dan realisasi Rp 1.375.509.615,- atau sebesar 77,20%. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena beberapa jabatan yang belum terisi personilnya sehingga berdampak pada realisasi keuangan	Untuk disesuaikan pada saat perubahan anggaran
1	05	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target s.d triwulan III sebanyak 14 dokumen dan realisasi 14 dokumen yaitu Laporan Keuangan Tahun 2023 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulanan 3 dok, Laporan Bulanan Bendahara 9 dok dan Laporan semester 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp 36.936.200,- dan Realisasi keuangan Rp. 22.420.470,- atau sebesar 60,70%. Terdapat SPJ Perjalanan Dinas yang belum di-GU kan menunggu perubahan anggaran. Sedangkan belanja honor upah jasa administrasi tidak realisasi karena masih kosong personilnya	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan
1	05	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</b>			
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dan target s.d triwulan III sebanyak 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp 17.176.300,-Dan Realisasi sebesar Rp.8.400.000 atau sebesar 48,90%. Hal ini disebabkan karena Terdapat belanja ATK, Kertas & Cover, cetak dan bahan komputer masih dalam proses E-Catalog sedangkan perjalanan dinas disediakan untuk penyusunan laporan tetapi s.d triwulan III, penyusunan laporan dilakukan dilingkup Kab. Luwu Timur sehingga belanja perjalanan dinasnya belum digunakan.	Agar PPTK segera melakukan percepatan belanja E-Catalog
1	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, target pada triwulan III sebanyak 9 orang dan terealisasi 9 org (Bimtek Manajemen Bencana Tingkat Operator metode non klasikal =1 org Diklat Manajemen Dasar Bencana = 1 orang, Bimtek Penganggaran TAPD = 1 org, Bimtek Perencanaan Keuangan Daerah = 2 org, Bimtek Pengelola sisten BMD= 1 org dan Bimtek PPK Type-C = 1 org dan Diklatpim III 1 org dan Diklatpim IV 1 org) dengan capaian kinerja 100%. Pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan undangan ataupun pemanggilan peserta.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp 32.890.000,- dan realisasi Rp 21.969.500,- atau sebesar 66,80%. Realisasi keuangan disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta	
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator out put sub kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan sebanyak 8 jenis setiap triwulannya dan terealisasi 7 jenis yaitu Balon Lampu, Kabel, Fitting Lampu, Terminal, Steker dan trafo, saklar dengan realisasi kinerja 87,5%.	Dan disediakan anggaran s.d triwulan III sebesar Rp 9.468.750,- dan realisasi keuangan Rp. 4.676.000 (49,38%) Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan

1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 20 jenis setiap triwulan, dan untuk triwulan III terealisasi 14 jenis yaitu BBM operasional 1 jenis dan 13 jenis alat dan bahan kebersihan dengan persentase capaian kinerja 70%.	Disediakan anggaran s.d triwulan III sebesar Rp 18.745.875,- dan Realisasi keuangan Rp12.800.000,- atau sebesar 68,28%. Terdapat SPJ senilai Rp 2.531.000,- yang baru akan diGU-kan awal Oktober 2024. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan sebanyak 3 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 100% yaitu cetak, jilid dan penggandaan	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp 22.410.000,- Realisasi keuangan Rp12.425.000 atau sebesar 55,44%.Terdapat Belanja E-Catalog yang masih dalam proses administrasi.	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, dan target s.d triwulan III sebanyak 45 expl dan realisasi 45 expl yaitu koran lokal 9 expl, koran nasional 9 expl, koran regional 37 expl dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp 5.040.000,- dan realisasi keuangan Rp 4.020.000,- atau sebesar 79,76%, hal ini karena masih terdapat penyedia koran yang belum melakukan penagihan.	Agar PPTK segera menghubungi penyedia untuk melakukan pembayaran.
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dan target s.d triwulan III sebanyak 281 org dan terealisasi 245 org dengan capaian kinerja 87,18%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp 15.500.000 dan realisasi keuangan Rp. 5.650.000 atau 36,45% karena Terdapat SPJ senilai Rp 2.250.000 yang yang belum di-GU-kan	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target s.d triwulan III sebanyak 35 kali dan realisasi 38 kali, capaian kinerja 108,5%.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp 259.530.080,- dan realisasi keuangan Rp 244.076.122 atau sebesar 94,05%.	
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah mebel yang diadakan sebanyak 4 unit. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2024. Namun tertunda pelaksanaannya karena adanya perbaikan rekening belanja sehingga menunggu perubahan anggaran	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp 26.500.000, yaitu belanja Filling Kabinet dan Lemari arsip dan realisasi keuangan masih 0%	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi dan percepatan realisasi belanja melalui e-catalog
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan sebanyak 4 unit. Berdasarkan anggaran kas maka Pengadaan BM. Pengadan Peralatan dan mesin direncanakan pada Triwulan II TA. 2024. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2024, Namun belum terealisasi. Untuk BM. Pengadaan PC dalam proses pejabat pengadaan. Sedangkan untuk pengadaan Mesin Babat masih dalam proses pencarian penyedia dan jenis barang sesuai TKDN dalam e-catalog Nasional.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp 59.000.000, yaitu belanja Komputer PC Rp 54.000.000,- dan belanja alat pembersih mesin babat Rp. 5.000.000 dan realisasi keuangan masih 0%.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi dan percepatan realisasi belanja melalui e-catalog
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas yang diadakan sebanyak 1 unit. Dan realisasi 1 unit (100%)	Disediakan anggaran sebesar Rp 555.500.000,- dan realisasi Rp 549.838.000 (98,98%).	

1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah umlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sebanyak 3 unit. Dan realisasi 3 unit Pengadaan AC 1 PK = 1 unit dan AC 1/2 PK = 2 unit	Disediakan anggaran kas pada triwulan III sebesar Rp 17.000.000,yaitu belanja alat pendingin AC Rp. 17.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.600.000 atau sebesar 91,76%. Terdapat sisa kontrak sebesar Rp 400.000.	Agar PPTK mencermati sisa SPK/Kontrak untuk disesuaikan pada saat perubahan anggaran.
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, dan target s.d triwulan III sebanyak 300 surat dan realisasi 251 surat dengan persentase capaian kinerja 83,66%. Capaian kinerja disesuaikan dengan jumlah surat yang dikeluarkan maupun yang diterima.	Disediakan anggaran s.d triwulan III sebesar Rp 4.199.970,- dan Realisasi keuangan Rp 2.405.395 atau sebesar 57,27%.Terdapat belanja E-Catalog senilai Rp 1.461.860 yang baru akan diGU-kan awal Oktober 2024, sedangkan untuk belanja paket/pengiriman disesuaikan dengan kebutuhan kantor	Agar PPTK melakukan percepatan proses belanja e-catalog dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, dan target s.d triwulan III sebanyak 27 rekening dan realisasi 27 rekening yaitu Listrik BPBD 9 rek, Token Listrik 5 rek, Air kantor 9 rek, kartu halo 9 rek. Capaian kinerja sebesar 100%	Disediakan anggaran s.d triwulan III sebesar Rp 41.865.516,- Dan Realisasi keuangan Rp 31.840.536 atau 76,05%. Realisasi keuangan sifatnya Riil Cost	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 2 orang setiap triwulan. Sedangkan realisasi s.d triwulan II sebanyak 2 org dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran s.d triwulan III sebesar Rp 14.850.000,- dan Realisasi keuangan Rp 12.800.000 atau 86,20%. Terdapat sisa anggaran karena Pembayaran Gaji Bulan September untuk Cleaning service baru diLS-kan pada Awal Oktober 2024 sedangkan Honor Pejabat Pengadaan bulanSeptember baru diLS-kan awal Oktober 2024	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah</b>			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan target 13 unit setiap triwulan dan realisasi s.d triwulan II sebanyak 9 unit yaitu Mobil DD 8152 Kampas Koplen, master rem . Mobil DD 5153 Aki. Mobil Dinas DD 8170 dan Mobil Truk Serbaguna DD8153= 2 unit, Kendaraan Roda dua = 5 unit. Capaian kurang dari target disebabkan karena pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan.	Disediakan anggaran s.d triwulan III sebesar Rp 74.600.000,- dan Realisasi keuangan Rp. 22.905.000,- atau 30,70%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi kendaraan dinas agar siap pakai
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target s.d triwulan II sebanyak 22 unit dan terealisasi 20 unit yaitu Tenda 1 unit, Printer 5 unit, Laptop 6 unit, Komputer 1 unit, Perahu karet 3 unit, chainsaw 5 unit, mesin babat 1 unit dengan persentase capaian kinerja 93,75%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi peralatan.	Disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp 17.586.000,- dan Realisasi keuangan Rp. 6.830.000,- atau sebesar 38,84%. Terdapat SPJ untuk Pemeliharaan Perahu Karet senilai Rp 45.000.000,- yang masih menunggu perubahan anggarani. Pada dasarnya Penggunaan anggaran disesuaikan dengan peralatan kantor yang mengalami perbaikan	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan

1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi setiap triwulan sebanyak 1 unit dan realisasi kinerja masih 100%. Kegiatan yang dilakukan adalah pengecatan pagar kantor. Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.	Disediakan anggaran s.d triwulan III sebesar Rp 8.500.000,- Realisasi keuangan Rp. 5.644.000% atau 66,40%. Terdapat SPJ yang baru akan di GU-kan pada awal Oktober 2024.	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi gedung kantor
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
1	05	03	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>			
1	05	01	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target 250 org. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan II TA. 2024, namun baru terealisasi pada Bulan Juli 2024. Peserta sosialisasi adalah Pelajar Tingkat SMP/SMA dan sedangkan untuk papan himbauan peringatan dini bencana dalam proses pelaksanaan.	Disediakan anggaran kas s.d Triwulan III sebesar Rp 116.395.070 dan realisasi Rp 24.923.860 (21,41%).Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada Triwulan II TA. 2024. Terdapat 2 uraian sub kegiatan yaitu Sosialisasi KIE Rawan Bencana dan telah dilaksanakan pada Bulan Juli 2024, dengan sasaran sosialisasi adalah Pelajar Tingkat SMP/SMA. Sedangkan untuk BM. Pengadaan Papan Himbauan, saat ini dalam proses pelaksanaan.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	03	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			
1	05	01	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah aparaturnya dan warga Negara yang ikut pelatihan, dengan target sebanyak 100 orang. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III TA. 2024. Direncanakan pelaksanaannya pada Bulan Oktober 2024	Berdasarkan Anggaran Kas, sub kegiatan direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan III TA. 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.020.750,-. Direncanakan pelaksanaannya pada Bulan Oktober 2024 dan saat ini menunggu Nota Dinas Persetujuan.	Agar PPTK melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 77 unit. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan II TA. 2024, namun tertunda karena akan dilakukan perubahan rekening belanja sehingga menunggu perubahan anggaran	Disediakan anggaran kas s.d Triwulan II sebesar Rp. 65.750.000,- namun belum realisasi menunggu perubahan anggaran.	Agar PPTK melakukan perbaikan rekening belanja modal pada saat perubahan anggaran
1	05	01	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk, dengan target sebanyak 4 desa. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III TA. 2024 dan terealisasi 100%.	Berdasarkan Anggaran Kas, sub kegiatan direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan III TA. 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.937.060,- namun realisasi keuangan masih 0% karena SPJ pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses GU Nihil.	Agar PPTK merampungkan administrasi keuangan

1	05	01	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat, dengan target sebanyak 50 orang, sub kegiatan ini akan direncanakan pada Triwulan II TA. 2024, namun baru realisasi pada Triwulan II TA. 2024 dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat sebanyak 37 org	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III TA. 2024 sebesar Rp 35.877.450,- dan realisasi keuangan 82,56%. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target karena target jumlah peserta 50 org sedangkan yang mengikuti diklat hanya 37 org sehingga beberapa s rekening belanja misalnya makan minum dan pakaian pelatihan disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir.	
1	05	01	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 250 org dan realisasi 250 org dengan capaian kinerja 100%. sub kegiatan ini akan direncanakan pada Triwulan I TA. 2024, namun terealisasi pada Triwulan II TA. 2024. Sub kegiatan ini merupakan tindaklanjuti dari Kerjasama BPBD dan Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur. Pelaksanaan gladi/simulasi diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.	Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 37.138.100,- realisasi keuangan Rp. 36.712.100,- atau sebesar 98,85%.	
1	05	03	2.03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			
1	05	01	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan Januari s.d September 2024 (235 kejadian), semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat.	Disediakan anggaran s.d triwulan III sebesar Rp 471.167.530,- Terealisasi sebesar Rp.351.543.800,- atau sebesar 74.61 % dari target anggaran sampai dengan Triwulan III , terdapat beberapa SPJ yang belum di GU-kan yaitu SPJ Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah sebesar Rp 19.436.200,- , Gaji TRC Bulan September Rp. 31.380.000 dan uang Jaga Sebesar Rp 10.560.000, Belanja BBM Rp. 600.000,- . Jadi Total SPJ yang belum ter GU kan sebesar Rp. 61.976.200,-	PPTK merampungkan SPJ keuangan
1	05	01	2.03	03	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan januari s.d September 2024 sebanyak 845 jiwa (452 Laki-laki dan 393 Perempuan) dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Disediakan anggaran s.d triwulan III sebesar Rp 33.317.050,- dengan realisasi sebesar Rp.11.278.000 ,- atau 33.85% dari anggaran kas Triwulan III, Namun masih terdapat SPJ perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 20.823.350,- dan Belanja Bahan Bakar Minyak/pelumas yang belum di GU-kan sebesar Rp.350.000,-dan Makan minum aktifitas lapangan Rp. 1500.000,- .Total belanja yang belum ter GU kan sebesar Rp. 22.673.350,-	PPTK merampungkan SPJ keuangan
1	05	01	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan januari s.d September 2024 sebanyak 845 jiwa (452 Laki-laki dan 393 Perempuan) dan semuanya terlayani bantuan logistik baik itu berupa sandang pangan dan hunian sementara (tenda) bagi yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan.	Disediakan anggaran s.d triwulan III sebesar Rp . 36.008.000- dengan realisasi sebesar Rp. 16.496.450,- atau 45.81% dari target anggaran kas pada triwulan III. Namun masih terdapat SPJ Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 900.000,- , Belanja perjalanan Dinas yang belum di GU-kan sebesar Rp. 31.488.550- , Belanja Bahan Komputer sebesar Rp. 450.000,- Sehingga Total SPJ Belanja yang belum ter GU kan sebesar Rp. 32.838.550,-	PPTK merampungkan SPJ keuangan

1	05	01	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Indikator Output adalah Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana pada bulan januari s.d September 2024 sebanyak 36 personil dan semuanya aktif dalam penanggulangan bencana	Disediakan anggaran pada triwulan III sebesar Rp 16.383.450,- Namun realisasi keuangan sampai pada triwulan III masih 0%, hal ini disebabkan karena anggaran sifatnya disediakan dan tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan aktivasi sistem komando penanganan darurat.	PPTK melaksanakan sub kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
1	05	01	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non alam yang ditangani oleh BPBD terkait giat pemulasaran jenazah covid-19, semuanya direspon kurang dari 24 jam. pada periode Triwulan III tidak ada laporan Masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) atau akibat pandemi lain dan akibat gagal teknologi yang diterima oleh TRC BPBD.	Dan disediakan anggaran s.d triwulan III sebesar Rp 26.747.040,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- hal ini disebabkan karena sampai dengan triwulan III tahun 2024 tidak ada kejadian akibat Covid 19 dan bencana wabah penyakit lainnya atau akibat gagal teknologi.	PPTK melaksanakan sub kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun sebanyak 3 dokumen. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada Triwulan III TA. 2024. Dan realisasi kinerja masih 0%.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp. 18.139.860,- namun realisasi keuangan masih 0%. Berdasarkan anggaran kas, penyusunan Perbup dan SOP direncanakan pada triwulan II s.d III, dan terkait dengan penyusunan perbup RPB dan KRB, saat ini rekomendasi RPB telah terbit sedangkan KRB masih menunggu rekomendasi dari BNPB. Sedangkan beberapa SOP masih dalam proses penyusunan.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi sebanyak 1 Forum. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada Triwulan II & III TA. 2024 dan Realisasinya masih 0%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan III sebesar Rp. 62.553.580,- namun realisasi keuangan masih 0,97%. Berdasarkan anggaran kas, direncanakan pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan II s.d III, dan saat ini SK Forum PRB dalam proses perbaikan struktur forum dan direncanakan pelaksanaannya pada Minggu I Bulan Nopember sedangkan untuk penilaian IKD akan dilaksanakan pada Minggu ke-IV K-Oktober menyesuaikan dengan kesediaan Fasilitator Nasional untuk pendampingan.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta percepatan pelaksanaan kegiatan

1	05	01	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	TARGET output sub kegiatan pada triwulan III yaitu tersusunnya dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 100%	Anggaran kas sampai dengan TW 3 sebesar Rp 408.092.020 dan terealisasi Rp 27.064.207 (6,63%). Realisasi keuangan masih rendah karena belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa, dan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam tidak dapat direalisasikan dan akan dihapus pada perubahan anggaran karena anggaran tersebut akan dialihkan ke Tahun 2025 menyesuaikan dengan hasil konsultasi dengan BNPB RI bahwa penyaluran dana Hibah RR akan terealisasi pada tahun 2025.	Agar PPTK segera merampungkan SPJ administrasi keuangan agar dapat segera terealisasi kinerja dan keuangan. Dan tetap mengawal dana hibah RR tersebut
---	----	----	------	----	---	--	---	---

## BAB 4

## PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada Triwulan III Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.894.181.864,- (63,82%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.407.509.615,- (48,63%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 921.234.249,- (31,83%) dan Belanja Modal Rp 565.438.000,- (19,53%).
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis I dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah s.d Triwulan III Tahun 2024 sebesar **98,36%** dengan **predikat BAIK**.
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis II yaitu Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Target Tahun 2024 sebesar **100%** dengan realisasi **85,79% predikat Baik**
- d. Persentase Capaian Kinerja sasaran III (sasaran pendukung) yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah s.d Triwulan III Tahun 2024 sebesar **94,51%**, dengan **predikat BAIK**.
- e. Persentase Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu :
  - Pelayanan Informasi Rawan Bencana : 67,15%
  - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : 98,86%
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : 65,86%

- f. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 terhadap beberapa target sasaran Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur yaitu :
- Pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai rencana aksi dan anggaran kas yang telah ditetapkan
  - Keterlambatan proses pengadaan melalui E-Catalog
  - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
  - Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian bencana
  - Terdapat papan himbauan peringatan dini bencana yang rusak berat sehingga berdampak kepada capaian SPM Pelayanan informasi rawan bencana yang kurang dari 100%
  - Terdapat perbedaan persepsi terkait penetapan target triwulanan dan tahunan pada saat penginputan aplikasi SPM Sub Urusan Bencana sehingga terjadi perubahan target.
  - Terdapat perubahan rekening belanja pada beberapa sub kegiatan sehingga menunggu perubahan anggaran
- g. Strategi dan Kebijakan yang dilakukan dalam Pencapaian Target Kinerja OPD sampai dengan Triwulan III TA. 2024 yaitu :
- Untuk Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana pada Layanan Informasi Rawan Bencana yaitu dengan memaksimalkan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan melalui media sosial dan penempatan papan himbauan peringatan dini bencana di daerah rawan bencana.
  - Memaksimalkan koordinasi lingkup OPD, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan kebencanaan misalnya melalui pelaksanaan Mitigasi dan Edukasi misalnya Baznas Tanggap Bencana, pemangkasan pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa manusia sebagai upaya Mitigasi dan Pencegahan.
  - Mitigasi Bencana Banjir melalui Pembersihan Sungai
  - Memfasilitasi kegiatan kebencanaan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan berpartisipasi sebagai Narasumber.
  - Pengajuan Proposal Peralatan dan Logistik Korban Bencana ke BNPB melalui BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

h. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana aksi
- Percepatan proses pengadaan melalui E-Catalog
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
- Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana dalam rangka pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
- Memaksimalkan penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial
- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
- Mencermati /kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA program diakhir tahun
- Memprioritaskan program/kegiatan pengampuh Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana
- Mencermati penetapan target tahunan dan triwulanan SPM
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPBD dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 10 Oktober 2024

**KEPALA PELAKSANA,**



**dr. APRIL, M. Kes**

Jabatan : Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 200012 1 002

**LAMPIRAN 1**  
**TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT TRIWULAN II TAHUN 2024**

***Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah***

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.	Agar melakukan koordinasi dengan OPD yang menangani perencanaan agar mengkoordinir penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja, pedoman teknis pengukuran kinerja, SOP Pengumpulan data Kinerja agar seragam di setiap OPD	Telah dilakukan koordinasi ke OPD yang menangani perencanaan terkait penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja, pedoman teknis pengukuran kinerja, SOP Pengumpulan data Kinerja agar seragam di setiap OPD	Selesai
2.	Melibatkan seluruh pegawai dalam menetapkan perencanaan kinerja sehingga semua pegawai peduli serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan	Seluruh pegawai telah dilibatkan dalam bentuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penetapan Targetnya	Selesai
3.	Lakukan perbaikan pengukuran kinerja, berikan reward dan punishment kepada pegawai yang berkinerja baik dan berkinerja buruk	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, namun pemberian reward and punishment belum dilaksanakan karena belum adanya regulasi atau payung hukum yang dapat dijadikan pedoman.	Selesai

4.	Informasikan kepada seluruh pegawai pelaporan kinerja, sehingga hasil kinerja yang tertuang dalam pelaporan kinerja dapat menjadi dasar penyesuaian strategi dan mempengaruhi budaya kerja organisasi	Pelaporan kinerja telah diinformasikan kepada seluruh pegawai melalui WA group kantor dan melalui rapat internal OPD	Selesai
5.	Lakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi internal, tingkatkan SDM pegawai yang melakukan evaluasi	Pelaksanaan evaluasi internal telah dilakukan secara periodic, sesuai dengan SK Tim Evaluasi Nomor 09.a Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja BPBD Kab. Luwu Timur Tahun 2024.	Selesai